

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202209195, 7 Februari 2022

Pencipta

Nama : **Prof. Dr. Johar Amir, M.Hum., Dr. Azis, S.Pd., M.Pd. dkk**
Alamat : Jln. A.P. Pettarani, Makassar, SULAWESI SELATAN, 90222
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**
Alamat : Jln. A.P. Pettarani, Makassar, SULAWESI SELATAN, 90222
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**
Judul Ciptaan : **KARTU DATA: ANALISIS WACANA KRITIS PENDEKATAN THEO VAN LEEUWEN PADA MEDIA E-PAPER HARIAN FAJAR DAN E-PAPER MEDIA INDONESIA**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 1 Februari 2022, di Makassar
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000324499

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Prof. Dr. Johar Amir, M.Hum.	Jln. A.P. Pettarani
2	Dr. Azis, S.Pd., M.Pd.	Jln. A.P. Pettarani
3	Dr. Ambo Dalle, M.Hum.	Jln. A.P. Pettarani
4	Nur Ikraam Syafruddin, S.Pd., M.Pd.	Jln. A.P. Pettarani



KARTU DATA

**ANALISIS WACANA KRITIS PENDEKATAN THEO VAN LEEUWEN
PADA MEDIA *E-PAPER* HARIAN FAJAR DAN *E-PAPER* MEDIA INDONESIA**

bu

Prof. Dr. Johar Amir, M.Hum.

Dr. Azis, S.Pd., M.Pd.

Dr. Ambo Dalle, M.Hum.

Nur Ikraam Syafruddin, S.Pd., M.Pd.

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

KARTU DATA

WACANA KRITIS PENDEKATAN THEO VAN LEEUWEN

PADA *E-PAPER* HARIAN FAJAR DAN *E-PAPER* MEDIA INDONESIA

Kartu data ini merupakan teks-teks yang telah dikumpulkan melalui media daring E-paper Harian Fajar dan E-paper Media Indonesia dan telah didistribusi dalam bentuk tabel. Data-data dalam tabel telah melewati verifikasi dan validasi oleh pakar dalam bidang bahasa khususnya wacana. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada teori Theo van Leeuwen. Terdapat dua tingkatan yang menjadi inti dalam kartu data, yaitu wacana yang dilihat dari segi tingkatan eksklusi dan inklusi. Hal-hal yang disarankan oleh validator telah diperbaiki secara cermat.

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
Eksklusi	Strategi eksklusi pada <i>E-paper</i> Harian fajar dan <i>E-paper</i> Media Indonesia dalam pemberitaan mengenai pelanggaran dalam dunia pendidikan	Menelaah bentuk pemberitaan yang di dalamnya terdapat upaya secara tidak langsung mengubah pemahaman khalayak mengenai suatu isu dengan menggunakan teknik eksklusi yaitu menyembunyikan aktor dengan strategi tertentu	Pasivasi merupakan strategi pengubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif, dengan kalimat pasif dapat membuat pembaca tidak kritis dalam mananggapi suatu berita. Pada umumnya menggunakan prefiks <i>ter-</i> , <i>di-</i> , <i>ke-an</i> . Kartu data pasivasi pada <i>E-paper</i> Harian Fajar dan <i>E-paper</i> media Indonesia: <i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Rekrutmen Guru PPPK Diskriminatif” (<i>Edisi 2 Januari 2021</i>) <ol style="list-style-type: none">1) <i>Pemerintah menutup rekrutmen guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) pada 2021. Kebijakan ini dinilai mendiskriminatif profesi guru (D1)</i>2) <i>Menurutnya, yang dibutuhkan guru terutama</i>	Pasivasi Prefiks di- (dinilai) (D1)

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>honorar, adalah kepastian untuk diangkat menjadi CASN. Utamanya yang sudah lama mengabdikan di sekolah-sekolah. Bahkan, banyak yang mengabdikan dipelosok desa dan pulau (D2)</i></p> <p>3) <i>Saat ini, desakan guru honorar yakni tetap diangkat menjadi CASN. Dia juga melihat ada kesan diskriminasi. Sebab, hanya profesi guru saja yang disasar menjadi PPPK. Sementara formasi lain tidak. Padahal, peran guru sangat penting, sehingga tetap layak menjadi ASN. Kalaupun tak diangkat menjadi ASN, mereka meminta jaminan kepastian pensiun dan pesangon (D3)</i></p> <p>4) <i>Kalaupun tak diangkat menjadi ASN, mereka meminta jaminan kepastian pensiun dan pesangon. (D4)</i></p> <p><i>E-paper Harian fajar “Judul Berita: Kejari Luwu Sita Dua Koper Dokumen” (Edisi 27 Januari 2021)</i></p> <p>5) <i>Sementara itu, Kepala Kejari Luwu, Erny Veronica Maramba mengatakan, dokumen yang disita ini sangat mendukung proses pembuktian di persidangan nantinya. Menurutnya, penggeledahan dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri (PN) Luwu. (D5)</i></p> <p>6) <i>Terkait dengan tiga tersangka, Erny mengaku,</i></p>	<p>Pasivasi Prefiks di- (diangkat) (D2)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (diangkat) (D3)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (diangkat) (D4)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dilakukan) (D5)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>tidak dikakukan penahanan. Alasannya, para tersangka dinilai kooperatif selama pemeriksaan. Pertimbangan lain saat ini masa pandemi (D6)</i></p> <p>7) <i>Terkait dengan tiga tersangka, Erny mengaku, tidak dilakukan penahanan. Alasannya, para tersangka dinilai kooperatif selama pemeriksaan. Pertimbangan lain karena saat ini masa pandemi. (D7)</i></p> <p><i>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: ‘Karpas Merah’ untuk Anak Guru” (Edisi 4 Februari 2021)</i></p> <p>8) <i>Jatah ini diberikan kepada anak guru, baik yang berstatus PNS maupun tenaga honorer. Begitupun dengan anak para staf atau tenaga administrasi lain yang bertugas di sekolah. (D8) Menurutnya prioritas harus diberikan kepada anak guru. (D8)</i></p> <p>9) <i>Bahkan, menurutnya anak guru mesti tertampung ketimbang mereka yang mendaftar lewat jalur tersebut.”Harus lulus, jangan sampai tidak diterima. Tidak boleh lagi ada pertimbangan jarak (untuk anak guru),” desaknya. (D9)</i></p> <p>10) <i>Hanya saja, pihaknya memberi batasan. Khusus jalur anak guru hanya disediakan di sekolah tempat orang tuanya mengajar. “Tidak boleh di sekolah lain, karena melanggar aturan. Kecuali</i></p>	<p>Pasivasi Prefiks di- (dilakukan) (D6)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dinilai) (D7)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (diberikan) (D8)</p> <p>Pasivasi Prefiks ter- (tertampung) (D9)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (disediakan) (D10)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>masuk di sekolah lain lewat jalur prestasu atau zonasi,” lanjutnya. (D10)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Pemecatan Guru Honorer dinilai Berlebihan” (Edisi 11 Februari 2021)</p> <p>11) <i>Hervina menjadi salah seorang guru honorer di SD 169 Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone yang dipecat sepihak oleh sekolah. Diduga gara-gara memosting status di facebook soal gajinya.(D11)</i></p> <p>12) <i>Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim menilai, pemecatan ini berlebihan. Guru honorer juga katanya, sangat dilematis karena tidak ada perlindungan dalam menjalankan tugas mereka. Sebab, mereka bisa dihentikan kapan saja . (D12)</i></p> <p>13) <i>Kata dia, kepala sekolah dengan guru honorer tersebut harus kembali dipertemukan (D13)</i></p> <p>14) <i>Sementara itu, Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi turut memberikan respons. Guru tersebut tidak diberhentikan. Melainkan, sudah banyak tenaga guru di sana. (D14)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Dorong Perbaikan</p>	<p>Pasivasi Prefiks di- (diduga) (D11)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dihentikan) (D12)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dipertemukan) (D13)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (diberhentikan) (D4)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>Gaji Honorer” (<i>Edisi 14 Februari 2021</i>)</p> <p>15) Anggota DPR RI, Muhammad Adras menegaskan, jangan hanya karena gara-gara memposting gaji di media sosial yang diperoleh selama 4 bulan sebesar Rp 700 ribu, lalu secara sepihak diberhentikan sebagai guru honorer di SDN 169 Sadar, Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe. (D15)</p> <p>16) Kata dia, sekarang daerah terpencil ada kekhususan mereka diberikan gaji lebih dari honorer di kota. Bahkan pemerintah sesungguhnya lebih memprioritaskan warga dari daerah terpencil itu sebagai ASN. Tidak perlu melalui mekanisme seperti ASN lainnya. (D16)</p> <p>17) Kepala Desa Sadar, Andi Sudi Alam, meminta kepada pihak terkait untuk tidak memberhentikan Hervina sebagai guru honorer. Namun, dicarikan solusi untuk kembali mengajar. (D17)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Belum Ada Izin</p>	<p>Pasivasi Prefiks di- (diberhentikan) (D15)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (diberikan) (D16)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dicarikan) (D17)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>Belajar di Sekolah” (Edisi 5 Maret 2021)</p> <p>18) <i>Kumpul-kumpul di sekolah, harus siap-siap dibubarkan. Kecuali ada surat izin dari Satgas Covid-19. (D18)</i></p> <p>19) <i>Aktivitas belajar mengajar sengaja dilakukan di luar ruangan. Pengawasan ketat dalam hal penerapan protokol kesehatan juga menjadi atensi selama tiga jam. Pembelajaran dimulai pukul 08.00 Wita. (D19)</i></p> <p>20) <i>Kabid Humas Plda Sulse Kombes Pol Zulfa mengatakan, sekolah ataupun Dinas Pendidikan Sulsel belum menyampaikan adanya rencana membukaaktivitas belajar. Makanya sekolah yang melaksanakan kegiatan itu akan ditertibkan. Aktivitas pembelajaran pun dihentikan.(D20)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Kejati Bakal Tahan dua Tersangka Lagi” (Edisi 12 Maret 2021)</p> <p>21) <i>BE alias Bursa Edi merupakan wakil ketua penanggung jawab kegiatan pengelolaan DAK. Dia akan dititip di tahanan Polres Polman selama 20 hari ke depan. (D21)</i></p> <p>22) <i>Untuk dua tersangka lainnya yakni mantan Kabid SMA yang menjadi ketua penanggung</i></p>	<p>Pasivasi Prefiks di- (dibubarkan) (D18)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dilakukan) (D19)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dihentikan) (D20)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dititip) (D21)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (ditahan)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>jawab DAK itu, Burhanuddin Bohari dan koordinator fasilitator, Aking Djide juga segera akan ditahan. (D22)</i></p> <p>23) <i>Terkait peran Busra, Feri mengaku belum bisa dibeberkan, pasalnya masih tahap pengembangan penyidikan. (D23)</i></p> <p>24) <i>Tersangka Busra Edi saat akan dibawa ke Polres Polman tidak memberi sepatah kata pun ke awak media usai resmi mengenakan rompi oranye. (D24)</i></p> <p><i>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: Siswa Asrama Taruna diduga dilecehkan” (Edisi 13 Maret 2021)</i></p> <p>25) <i>Sedikitnya 25 orang siswa-siswi Sekolah Berpola Asrama Taruna Papua Timika diduga mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Pelakunya seorang oknum pembina asrama (D25)</i></p> <p>26) <i>Kasus itu baru terungkap setelah seorang siswa berusia enam tahun berinisial ST melaporkan kepada pembina asrama dan kepala sekolah Taruna Papua. (D26)</i></p> <p>27) <i>DF kini telah meringkuk dalam sel tahanan Polres Timika setelah ditangkap di rumah keluarganya di kawasan Jalan Budi Utomo</i></p>	<p>(D22)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dibeberkan) (D23)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dibawa) (D24)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (diduga) (D25)</p> <p>Pasivasi Prefiks ter- (terungkap) (D26)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (ditangkap)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>Ujung, Kelurahan Kamoro Jaya SP1, Timika, Kamis, 11 Maret. (D27)</i></p> <p>28) <i>Sejauh ini, pengelola Sekolah Asrama Taruna Papua belum dimintai tanggapannya terkait kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa puluhan siswa mereka. (D28)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: diduga Peras 82 Kepsek Fasilitator DAK ditahan” (Edisi 20 Maret 2021)</p> <p>29) <i>Aking diduga minta fee tiga persen dari DAK fisik 2020 yang mengucur ke seluruh SMA se-Sulbar. Selain Aking, Kejati juga sebelumnya telah menahan Staf Bidang SMA Disdik Sulbar, Bursa Edi, Rabu 10 Maret lalu. (D29)</i></p> <p>30) <i>Sehingga tersisa satu tersangka lagi yang belum ditahan, yakni Burhanuddin Bohari, Kepala Bidang SMA selaku penanggung jawab DAK 2020 Rp202 miliar itu. (D30)</i></p> <p>31) <i>Koordinator tim fasilitator DAK Sulbar, Aking Djide resmi ditahan Kejati Sulbar. Dia ditetapkan tersangka diduga telah memeras 82 kepala sekolah (Kepsek) menengah atas di Sulbar. (D31)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: 50 Persen Kasek-</p>	<p>(D27)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (diminta) (D28)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (diduga) (D29)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (ditahan) (D30)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (ditetapkan) (D31)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>Guru Suka Pungli” (Edisi 5 April 2021)</p> <p>32) Mutasi besar-besaran di lingkup Pemkot Makassar bakal dilakukan serentak bersama pejabat eselon II dan direksi perusahaan daerah. (D32)</p> <p>33) Karena itu, ia menegaskan, akan membersihkan hal itu semua. Penempatan pejabat akan dilakukan sesuai dengan prosedur. Melalui job fit. (D33)</p> <p>34) Ia pun menegaskan, laporan yang masuk mulai dari jenjang SD hingga SMP. Mulai dari memberatkan orang tua murid, sogok menyogok memakai dana sekolah untuk kepentingan pribadi, juga dilakukan, termaksud terlibat politik praktis (D34)</p> <p>35) Selain kepala sekolah, para guru juga akan dievaluasi. Laporan yang diterima pun serupa. Rencananya, evaluasi menyeluruh di sector pendidikan dilakukan bersamaan perombakan pejabat eselon II. (D35)</p> <p>36) Laporan yang diterima pun serupa. Rencananya, evaluasi menyeluruh di sektor pendidikan dilakukan bersamaan perombakan pejabat eselon II (D36)</p> <p>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: Tetap Mengajar</p>	<p>Pasivasi Prefiks di- (dilakukan) (D32)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dilakukan) (D33)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dilakukan) (D34)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dievaluasi) (D35)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dilakukan) (D36)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>Meski Belum digaji” (Edisi 6 Mei 2021)</p> <p>37) Hasil pertemuan itu, gaji honorer akan dicairkan dua tahap. (D37)</p> <p>38) Untuk anggaran, kata Danny, juga telah tersedia. Tidak ada halangan, sisa dicairkan. (D38)</p> <p>39) Kata Nielma, meski ada hambatan di SK, gaji mereka wajib dibayarkan. (D39)</p> <p>40) Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Andi Siswanta Attas menjelaskan, permasalahan belum terbayarkannya gaji guru karena SK perpanjangan kontrak mereka sejak Januari 2021 lalu hingga saat ini belum juga diteken. (D41)</p> <p>41) Ada 3.400 honorer di Pemprov Sulsel yang belum dibayar upahnya. Anggarannya dari APBD Sulsel dengan total Rp38 miliar. Per orang mendapat jatah Rp15 ribu per jam mengajar. (D41)</p> <p>42) Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Hery Sumiharto mengakui pembayaran upah honorer masih tertahan. Sebab, ada 200 orang yang dicurigai fiktif atau mermasalah. Akibatnya memengaruhi pencairan honor guru honorer</p>	<p>Pasivasi Prefiks di- (dicairkan) (D37)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dicairkan) (D38)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dibayarkan) (D39)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (diteken) (D40)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dibayar) (D41)</p> <p>Pasivasi Prefiks ter- (tertahan) (D42)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>lain. (D42)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: diduga Korupsi Bos Kantor Disdik digeleda” (<i>Edisi 28 Mei 2021</i>)</p> <p>43) <i>Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). (D43)</i></p> <p>44) <i>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan pejabat-pejabat yang terkait kasus dugaan korupsi BOP dan BOS diperiksa. (D44)</i></p> <p>45) <i>Menurutnya, setia warga negara termaksud pejabat, punya hak yang sama dihadapan hukum. Sehingga tidak ada masalah ketika para pejabat terkait diperiksa demi hukum (D45)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Salah Input, Potongan Sertifikasi dikembalikan” (<i>Edisi 31 Mei 2021</i>)</p> <p>46) <i>Idealnya, per triwulan dipotong satu persen dari tunjangan sertifikasi yang diperoleh. Namun kesalahan operator membuat tunjangan</i></p>	<p>Pasivasi Prefiks di- (dilakukan) (D43)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (diperiksa) (D44)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (diperiksa) (D45)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dipotong)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>sertifikasi terpangkas satu persen setiap bulan. (46)</i></p> <p>47) <i>Arifuddin menambahkan, pengembalian dilakukan langsung ke rekening masing-masing guru. Pihaknya sudah memberikan teguran keras kepada operatir terkait. Ia sendiri berjanji untuk memonitoring secara ketat agar kesalahan tak berulang (D47)</i></p> <p>48) <i>Menurutnya, proses pengembalian itu tidak diperlambat Proses penandatanganan dilakukan secara bertahap kepada semua guru yang menerima sertifikasi itu. (D48)</i></p> <p><i>E-paper Media Indonesia “Judul Berita: ASN DKI Terbukti Korupsi di Sekolah” (Edisi 27 Mei 2021)</i></p> <p>49) <i>Proses penganggaran itu juga sudah melalui pembahasan dengan DPRD DKI dan telah dipertimbangkan serta diperhitungkan sesuai dengan bobot kebutuhannya. (D49)</i></p> <p>50) <i>Widodo diduga menyelenggarakan anggaran fiktif untuk menghabiskan dana BOP. Ia dibantu faisal. Uang yang disalahgunakan keduanya mencapai Rp7,8 miliar. (D50)</i></p> <p>51) <i>Uang yang disalahgunakan keduanya diduga mencapai R-7,8 miliar. (D51)</i></p>	<p>(D46)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dilakukan) (D47)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dilakukan) (D48)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (diperhitungkan) (D49)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (diduga) (D50)</p> <p>Pasivasi Prefiks</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>52) Widodo disebut memiliki peran untuk mengambil kebijakan, sementara itu, Faisal diduga ikut berperan karena ia memiliki tugas sebagai pembimbing teknis kepala sekolah (D52)</p> <p>53) Widodo disebut memiliki peran untuk mengambil kebijakan, sementara itu, Faisal diduga ikut berperan karena ia memiliki tugas sebagai pembimbing teknis kepala sekolah (D53)</p> <p>54) Sementara itu, Faisal diduga memiliki tugas sebagai pembimbing teknis kepala sekolah. (D54)</p> <p>55) Meski Widodo sudah ditetapkan sebagai tersangka, Aroman mengatakan belum ada informasi mengenai perubahan status kepegawaian yang bersangkutan(D55)</p> <p>56) Sebaliknya, faisal sudah tidak berdinis di Sudin Pendidikan 1 Jakbar. Ia telah dimutasi ke Kecamatan taman Sari (D56)</p>	<p>di- (diduga) (D51)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (disebut) (D52)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (disebut) (D53)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- diduga(D54)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (teteapkan) (D55)</p> <p>Pasivasi Prefiks di- (dimutasi) (D56)</p>
			<p>Nominalisasi merupakan strategi mengubah kata kerja atau verba menjadi kata benda atau nomina, kata nomina tidak membutuhkan subjek sehingga ada aktor tersebut tidak perlu dihadirkan. Nominalisasi pada umumnya menggunakan konfiks <i>pe-an</i>.</p>	

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>Korpus data nominalisasi pada <i>E-paper</i> Harian Fajar dan <i>E-paper</i> media Indonesia:</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Rekrutmen Guru PPPK Diskriminatif” (<i>Edisi 2 Januari 2021</i>)</p> <p>1) <i>Pengangkatan</i> PPPK belum bisa menjamin kesejahteraan guru sepenuhnya (D1)</p> <p><i>E-paper</i> Harian fajar “Judul Berita: Kejari Luwu Sita Dua Koper Dokumen” (<i>Edisi 27 Januari 2021</i>)</p> <p>2) <i>Sementara itu, Kepala Kejari Luwu, Erny Veronica Maramba mengatakan, dokumen yang disita ini sangat mendukung proses <i>pembuktian</i> di persidangan nantinya. Menurutnya, penggeledahan dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri (PN) Luwu. (D2)</i></p> <p>3) <i>Sementara itu, Kepala Kejari Luwu, Erny Veronica Maramba mengatakan, dokumen yang disita ini sangat mendukung proses pembuktian di persidangan nantinya. Menurutnya, <i>penggeledahan</i> dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri (PN) Luwu. (D3)</i></p> <p>4) <i>Kasi Intel Kejari mengakui dokumen yang diambil akan menjadi barang bukti dalam kasus korupsi <i>pengadaan</i> seragam sekolah untuk SD</i></p>	<p>Nomina (pengangkatan) (D1)</p> <p>Nomina (pembuktian) (D2)</p> <p>Nomina (penggeledahan) (D3)</p> <p>Nomina (pengadaan) (D4)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>dan SMP tahun 2019 (D4)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: ‘Karpas Merah’ untuk Anak Guru” (<i>Edisi 4 Februari 2021</i>)</p> <p>5) <i>Dalam pembahasan tersebut poin jatah khusus untuk anak guru sempat menjadi perdebatan panjang. (D5)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Pemecatan Guru Honorer dinilai Berlebihan” (<i>Edisi 11 Februari 2021</i>)</p> <p>6) <i>Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim menilai, pemecatan ini berlebihan. (D6)</i></p> <p>7) <i>Guru honorer juga katanya, sangat dilematis karena tidak ada perlindungan dalam menjalankan tugas mereka. Sebab, mereka bisa diberhentikan kapan saja (D7)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Belum Ada Izin Belajar di Sekolah” (<i>Edisi 5 Maret 2021</i>)</p> <p>8) <i>Pengawasan ketat dalam hal penerapan protokol kesehatan juga menjadi atensi selama tiga jam. (D8)</i></p>	<p>Nomina (pembahasan) (D5)</p> <p>Nomina (pemecatan) (D6)</p> <p>Nomina (perlindungan) (D7)</p> <p>Nomina (pengawasan) (D8)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Kejati Bakal Tahan dua Tersangka Lagi” (<i>Edisi 12 Maret 2021</i>)</p> <p>9) <i>Para tersangka beralih untuk biaya jasa pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). (D9)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: 50 Persen Kasek-Guru Suka Pungli” (<i>Edisi 5 Apri 2021</i>)</p> <p>10) Penempatan pejabat akan dilakukan sesuai dengan prosedur. (D10)</p> <p><i>E-paper</i> Media Indonesia “Judul Berita: ASN DKI Terbukti Korupsi di Sekolah” (<i>Edisi 27 Mei 2021</i>)</p> <p>11) Penggelahan juga dilakukan di SMKN 53 Jakbar pada hari yang sama. (D11)</p>	<p>Nomina (pembuatan) (D9)</p> <p>Nomina (penempatan) (D10)</p> <p>Nomina (pengeledahan) (D11)</p>
Inklusi	Strategi inklusi pada <i>E-paper</i> Harian fajar dan <i>E-paper</i> Media Indonesia dalam pemberitaan mengenai pelanggaran dalam dunia pendidikan	Menelaah bentuk pemberitaan yang di dalamnya terdapat upaya menampilkan kelompok atau aktor-aktor sosial dengan apa adanya atau kelompok atau aktor-aktor sosial yang diberikan proses	<p>Abstraksi penggambaran kelompok atau aktor secara abstrak tidak memberi petunjuk secara jelas. Pada umumnya menggunakan kata berkali-kali, sering kali, berulang-ulang, dan sebagainya.</p> <p>Kartu data abstraksi pada <i>E-paper</i> Harian Fajar dan <i>E-paper</i> media Indonesia:</p>	

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
		<p>pemarginalisasi atau pengucilan aktor tertentu, dengan tujuan untuk melegitimasi pemahaman pembaca..</p>	<p><i>E-paper</i> Harian fajar “Judul Berita: Kejari Luwu Sita Dua Koper Dokumen” (<i>Edisi 27 Januari 2021</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tiga tersangka dalam kasus ini yakni Pejabat Pembuat komtmen (PPK), Andi Annawi, Fadli Fatahuddin (rekanan), dan Ibnu Harista (rekanan). (D1) 2) Pukul 15.30 Wita tim penyidik keluar dan membawa satu koper berkas terkait pengadaan seragam untuk SD dan SMP tahun 2019 senilai Rp1,6 milyar(D2) 3) Tim penyidik langsung bergerak ke Sekretariat Daerah. Mereka menggeledah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Pihaknya juga menyita satu koper dokumen dalam penggelahan di lokasi kedua ini(D3) <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Dorong Perbaikan Gaji Honorer” (<i>Edisi 14 Februari 2021</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Sebab, jumlah guru honorer lebih banyak di daerah terpencil dibanding ASN (D4) 5) Kepala Desa Sadar, Andi Sudi Alam, meminta kepada pihak terkait untuk tidak memberhentikan Hervina sebagai guru honorer. Namun, dicarikan solusi untuk kembali 	<p>Tiga tersangka (D1)</p> <p>Satu koper berkas (D2)</p> <p>Satu koper dokumen dan di lokasi kedua (D3)</p> <p>Lebih banyak (D4)</p> <p>Telah mengabdipuluhan tahun (D5)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>mengajar. Apalagi, dia telah mengabdikan puluhan tahun. (D5)</i></p> <p>6) <i>Sebab, terkadang guru bersatus ASN yang terangkat dan ditempatkan di Desa Sadar maupun Kecamatan Tellu Limpoe hanya aktif diawal-awal saja. Setelah beberapa lama meminta pindah. Padahal aturan menyebut siapa ditempatkan di mana saja. (D6)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Siswa Asrama Taruna diduga dilecehkan” (Edisi 13 Maret 2021)</p> <p>7) <i>Kepala Satuan Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto seperti dilansir dari Antara di Timika mengatakan, kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa puluhan siswa Sekolah Taruna Papua itu terjadi sejak November 2020 hingga 9 Maret 2021. (D7)</i></p> <p>8) <i>Dalam kondisi tidak berdaya, lanjut dia, ST yang masih usia taman kanak-kanak itu dipaksa DF untuk memuaskan nafsu bejatnya dengan cara sangat menjijikkan. (D8)</i></p> <p>9) <i>DF berhenti saat sejumlah anak-anak lain memanggil-manggil nama ST. Mendengar itu, DF menyuruh ST keluar dari kamar mandi (D9)</i></p>	<p>Setelah beberapa lama (D6)</p> <p>Puluhan siswa (D7)</p> <p>Yang masing usia taman kanak-kanak (D8)</p> <p>Sejumlah anak-anak lain (D9)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>10) <i>Pengakuan ST membuka tabir kejahatan DF selama beberapa bulan belakangan. (D10)</i></p> <p>11) <i>Sejumlah anak yang mengalami peristiwa serupa juga melaporkan pengalamannya kepada pembina asrama dan kepala sekolah. (D11)</i></p> <p>12) <i>Sejauh ini, pengelola Sekolah Asrama Taruna Papua belum dimintai tanggapannya terkait kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa puluhan siswa mereka. (D12)</i></p> <p><i>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: 50 Persen Kasek-Guru Suka Pungli” (Edisi 5 Apri 2021)</i></p> <p>13) <i>Hal ini dikarenakan banyaknya laporan yang masuk terkait masalah integritas. Terutama pungutan liar di lingkungan sekolah. (D13)</i></p> <p><i>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: Tetap Mengajar Meski Belum digaji” (Edisi 6 Mei 2021)</i></p> <p>14) <i>Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto juga tak bisa berbuat banyak. Menurut dia, guru honorer turun aksi, sudah ada keluhan kesah dari beberapa guru. (D14)</i></p>	<p>Beberapa bulan belakangan (D10)</p> <p>Sejumlah anak (D11)</p> <p>Puluhan siswa (D13)</p> <p>Banyaknya (D13)</p> <p>Dari beberapa guru (D14)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Media Indonesia “Judul Berita: ASN DKI Terbukti Korupsi di Sekolah” (<i>Edisi 27 Mei 2021</i>)</p> <p>15) Namun, sejumlah guru di sekolah itu menyatakan siap mengembalikan uang hasil korupsi itu kepada negara (D15)</p>	Sejumlah guru (D15)
			<p>Objektivasi merupakan strategi untuk menampilkan kelompok atau aktor-aktor sosial dengan memberi petunjuk yang konkret.</p> <p>Kartu data objektivasi pada <i>E-paper</i> Harian Fajar dan <i>E-paper</i> media Indonesia:</p> <p><i>E-paper</i> Harian fajar “Judul Berita: Kejari Luwu Sita Dua Koper Dokumen” (<i>Edisi 27 Januari 2021</i>)</p> <p>1) Tiga tersangka dalam kasus ini yakni Pejabat Pembuat komtmen (PPK), Andi Annawi, Fadli Fatahuddin (rekanan), dan Ibnu Harista (rekanan). (D1)</p> <p>2) Pukul 15.30 Wita tim penyidik keluar dan membawa satu koper berkas terkait pengadaan seragam untuk SD dan SMP tahun 2019 senilai Rp1,6 milyar (D2)</p> <p>3) Tim penyidik langsung bergerak ke Sekretariat Daerah. Mereka menggeledah Unit Kerja</p>	<p>Tiga tersangka (D1)</p> <p>Satu koper berkas (D2)</p> <p>Satu koper</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>Pengedaan Barang dan Jasa. Pihaknya juga menyita satu koper dokumen dalam penggelahan di lokasi kedua ini (D3)</i></p> <p><i>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: ‘Karpas Merah’ untuk Anak Guru” (Edisi 4 Februari 2021)</i></p> <p>4) <i>Tim Ahli Disdik Sulsel, Syarifuddin sempat memberikan gambaran, jika kuota perpindahan siswa dalam satu sekolah hanya 10 orang. Sementara pendaftar sesuai dengan jalur tersebut 8 orang, dan anak guru sebanyak 4 orang. (D4)</i></p> <p><i>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: Dorong Perbaikan Gaji Honorer” (Edisi 14 Februari 2021)</i></p> <p>5) <i>Anggota DPR RI, Muhammad Aras menegaskan, jangan hanya karena gara-gara memposting gaji di media sosial yang diperoleh selama 4 bulan sebesar Rp700 ribu, lalu secara sepihak diberhentikan sebagai guru honorer di SDN 169 Sadar, Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe (D5)</i></p>	<p>dokumen dan di lokasi kedua (D3)</p> <p>Satu sekolah hanya 10 orang. Sementara pendaftar sesuai dengan jalur tersebut 8 orang, dan anak guru sebanyak 4 orang (D4)</p> <p>Diperoleh selama 4 bulan sebesar Rp700 ribu (D5)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Belum Ada Izin Belajar di Sekolah” (<i>Edisi 5 Maret 2021</i>)</p> <p>6) <i>Sekretaris Satgas Covid-19 Sulsel, Ni'mal Lahamang juga menegaskan tren kasus Covid-19 masih cukup tinggi. Mencapai 200 kasus. (D6)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Kejati Bakal Tahan dua Tersangka Lagi” (<i>Edisi 12 Maret 2021</i>)</p> <p>7) <i>Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar akhirnya menahan satu tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020. Sementara dua tersangka lainnya segera menyusul. (D7)</i></p> <p>8) <i>BE alias Busra Edi merupakan wakil ketua penanggung jawab kegiatan pengelolaan DAK itu. Dia akan dititip di tahanan Polres Polman selama 20 hari ke depan. (D8)</i></p> <p>9) <i>Untuk dua tersangka lainnya yakni mantan Kabid SMA yang menjadi ketua penanggung jawab DAK itu, Burhanuddin Bohari dan koordinator fasilitator, Aking Djide juga segera akan ditahan. (D9)</i></p> <p>10) <i>Jelasnya, kata Feri, Busra Edi selaku staf pada Bidang PSMA, bersama-sama dengan Burhanuddin dan Kordinator fasilitaor Aking</i></p>	<p>Mencapai 200 kasus (D6)</p> <p>Satu tersangka (D7)</p> <p>Selama 20 hari kedepan (D8)</p> <p>Untuk dua tersangka lainnya (D9)</p> <p>Tiga persen kepada 82 kepala sekolah (D10)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>Djide meminta “jatah” tiga persen kepada 82 kepala sekolah penerima DAK. (D10)</i></p> <p>11) <i>Kejati menilai permintaan itu merupakan fee tiga persen itu merugikan negara. (D11)</i></p> <p>12) <i>Dari 82 sekolah total keseluruhan Rp1.425.330.050,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut adalah bagian dari Kerugian Negara. (D12)</i></p> <p>13) <i>Kepala seksi Penerangan Hukum Kejati Sulbar, Amiruddin menambahkan penyidik punya waktu 20 hari untuk membawa berkas Burhanuddin ke meja hijau. (D13)</i></p> <p><i>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: Siswa Asrama Taruna diduga dilecehkan” (Edisi 13 Maret 2021)</i></p> <p>14) <i>Sedikitnya 25 orang siswa siswi Sekolah Berpola Asrama Taruna Papua Timika diduga mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Pelakunya oleh seorang oknum pembina asrama. (D14)</i></p> <p>15) <i>Kasus itu baru terungkap setelah seorang siswa berusia enam tahun berinisial ST melaporkan kepada pembina asrama dan kepala sekolah Taruna Papua. (D15)</i></p> <p>16) <i>Korban berbaring di tempat tidur. Kemudian DF, 30, selaku pembina asrama putra</i></p>	<p>Fee tiga persen (D11)</p> <p>82 sekolah (D12)</p> <p>Waktu 20 hari (D13)</p> <p>25 orang siswa siswi (D14)</p> <p>Berusia enam tahun (D15)</p> <p>DF, 30 (D16)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>memanggil korban lalu mengajak korban ke kamar mandi pembina. (D16)</i></p> <p><i>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: diduga Peras 82 Kepsek Fasilitator DAK ditahan” (Edisi 20 Maret 2021)</i></p> <p>17) <i>Koordinator tim fasilitator DAK Sulbar, Aking Djide resmi ditahan Kejati Sulbar. Dia ditetapkan tersangka diduga telah memeras 82 kepala sekolah (Kepsek) menengah atas di Sulbar. (D16)</i></p> <p>18) <i>Aking diduga minta fee tiga persen dari DAK fisik 2020 yang mengucur ke seluruh SMA se Sulbar. (D18)</i></p> <p>19) <i>Sehingga tersisa satu tersangka lagi yang belum ditahan, yakni Burhanuddin Bohari, Kepala Bidang SMA selaku penanggung jawab DAK 2020 Rp202 miliar itu. (D19)</i></p> <p>20) <i>Kebijakan meminta tiga persen itu, lanjut Feri, diduga melanggar Permendikbud 11/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (D20)</i></p>	<p>82 kepala sekolah (D16)</p> <p>Fee tiga persen (D18)</p> <p>Tersisa satu tersangka (D19)</p> <p>Meminta tiga persen (D20)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: 50 Persen Kasek-Guru Suka Pungli” (<i>Edisi 5 Apri 2021</i>)</p> <p>21) <i>Ketua Ombudsman Kota Makasaar, Andi Ihwan Patiroy mengungkapkan, sektor paling tinggi pelanggaran administrasinya yaitu Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar. Dia mencatat ada 22 laporan yang diterima sepanjang tahun lalu. (D21)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Tetap Mengajar Meski Belum digaji” (<i>Edisi 6 Mei 2021</i>)</p> <p>22) <i>Ada 3.400 honorer di Pemprov Sulsel yang belum dibayar upahnya. Anggarannya dari APBD Sulsel dengan total Rp38 miliar. Per orang mendapat jatah Rp15 ribu per jam mengajar (D22)</i></p> <p>23) <i>Sebab, ada 200 orang yang dicurigai fiktif atau bermasalah. Akibatnya memengaruhi pencairan honor guru honorer lain. (D23)</i></p>	<p>22 laporan (D21)</p> <p>Ada 3.400 honorer di Pemprov Sulsel (D22)</p> <p>200 orang (D23)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Salah Input, Potongan Sertifikasi dikembalikan” (<i>Edisi 31 Mei 2021</i>)</p> <p>24) Dengan dalih membayar iuran BPJS Kesehatan, sebanyak 935 guru mendapatkan potongan berlebih dari tunjangan sertifikasinya. Kesalahan itu berakibat total jumlah pemotongan mencapai Rp670 juta. (D24)</p> <p><i>E-paper</i> Media Indonesia “Judul Berita: ASN DKI Terbukti Korupsi di Sekolah” (<i>Edisi 27 Mei 2021</i>)</p> <p>25) Kasi Penerangan Hukum Kejati DKI Ashari Syam mengatakan kedua ASN DKI itu telah menjadi tersangka (D25)</p> <p>26) Uang disalahgunakan keduanya diduga mencapai R-7,8 miliar (D26)</p>	<p>Sebanyak 935 guru (D24)</p> <p>Kedua ASN DKI (D25)</p> <p>Keduanya (D26)</p>
			<p>Nominasi merupakan strategi menampilkan kelompok atau aktor-aktor sosial berbentuk informasi apa adanya</p> <p>Kartu data Nominasi pada <i>E-paper</i> Harian Fajar dan <i>E-paper</i> media Indonesia:</p> <p><i>E-paper</i> Harian fajar “Judul Berita: Kejari Luwu Sita Dua Koper Dokumen” (<i>Edisi 27 Januari 2021</i>)</p> <p>1) <i>Terkait dengan tiga tersangka, Erny mengaku,</i></p>	<p>Erny (D1)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>tidak dikakukan penahanan. Alasannya, para tersangka dinilai kooperatif selama pemeriksaan (D1)</i></p> <p><i>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: Dorong Perbaikan Gaji Honorer” (Edisi 14 Februari 2021)</i></p> <p>2) <i>Kepala Desa Sadar, Andi Sudi Alam, meminta kepada pihak terkait untuk tidak memberhentikan Hervina sebagai guru honorer. Namun, dicarikan solusi untuk kembali mengajar. Apalagi, dia telah mengabdikan puluhan tahun. (D2)</i></p> <p>3) Andi Sudi meminta para pemangku kebijakan untuk memperhatikan nasib para guru honorer di Desa Sadar, termasuk seluruh guru honorer di Kecamatan Tellu Limpoe. (D3)</p> <p>4) <i>Kata dia, Hervina memiliki kepribadian baik. Sudah cukup mengabdikan. Yakni sekitar 16 tahun lamanya. (D3)</i></p> <p>5) <i>Sebab, terkadang guru berstatus ASN yang terangkat dan ditempatkan di Desa Sadar maupun Kecamatan Tellu Limpoe hanya aktif di awal-awal saja. Setelah beberapa lama meminta pindah (D4)</i></p>	<p>Hervina sebagai guru honorer (D2)</p> <p>Andi Sudi (D3)</p> <p>Hervina memiliki kepribadian baik (D3)</p> <p>Guru berstatus ASN (D4)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Kejati Bakal Tahan dua Tersangka Lagi” (Edisi 12 Maret 2021)</p> <p>6) <i>Terkait peran Busra, Feri mengaku belum bisa dibebaskan, pasalnya masih tahap pengembangan penyidikan. (D6)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Tetap Mengajar Meski Belum digaji” (Edisi 6 Mei 2021)</p> <p>7) <i>Koordinator aksi yang juga tenaga honorer di SDN 2 Mamajang, Ardi menyebut aksi damai sebagai wujud keresahan para guru. (D7)</i></p> <p>8) <i>Danny pun sudah berkonsultasi (D8)</i></p> <p><i>E-paper</i> Media Indonesia “Judul Berita: ASN DKI Terbukti Korupsi di Sekolah” (Edisi 27 Mei 2021)</p> <p>9) <i>Widodo diduga menyelenggarakan anggaran fiktif untuk menghabiskan dana BOP. (D9)</i></p> <p>10) <i>Widodo disebut memiliki peran untuk mengambil kebijakan (D10)</i></p> <p>11) <i>Sementara itu, Faisal diduga memiliki tugas sebagai pembimbing teknis kepala sekolah. (D11)</i></p> <p>12) <i>Ashari mengatakan penggeledahan itu dilakukan Kasi Pidana Khusus Kejari Jak-bar.</i></p>	<p>Bursa, Feri (D6)</p> <p>Ardi (D7)</p> <p>Danny (D8)</p> <p>Widodo (D9)</p> <p>Widodo (D10)</p> <p>Faisal (D11)</p> <p>Ashari (D12)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>(D12)</p> <p>13) <i>Widodo mengaku uang itu diberikan sebagai hinir tambangan untuk para guru. (D13)</i></p> <p>14) <i>Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Barat Aroman mengatakan Widodo masih mengajar dan berstatus sebagai guru (D14)</i></p> <p>15) <i>Meski Widodo sudah ditetapkan sebagai tersangka, Aroman mengatakan belum ada informasi mengenai perubahan status kepegawaian yang bersangkutan (D15)</i></p> <p>16) <i>Sebaliknya, faisal sudah tidak berdinis di Sudin Pendidikan 1 Jakbar. Ia telah dimutasi ke Kecamatan taman Sari (D16)</i></p>	<p>Widodo (D13)</p> <p>Widodo (D14)</p> <p>Widodo (D15)</p> <p>Faisal (D16)</p>
			<p>Kategorisasi merupakan penggambaran ciri aktor misalnya fisik, perilaku, agama, ras, dan sebagainya, dengan tujuan memarginalkan kelompok atau aktor-aktor sosial dalam teks.</p> <p>Kartu data kategorisasi pada <i>E-paper</i> Harian Fajar dan <i>E-paper</i> media Indonesia:</p> <p><i>E-paper</i> Harian fajar “Judul Berita: Kejari Luwu Sita</p>	

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>Dua Koper Dokumen” (<i>Edisi 27 Januari 2021</i>)</p> <p>1) <i>Terkait dengan tiga tersangka, Erny mengaku, tidak dikakukan penahanan. Alasannya, para tersangka dinilai kooperatif selama pemeriksaan (D1)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: ‘Karpas Merah’ untuk Anak Guru” (<i>Edisi 4 Februari 2021</i>)</p> <p>2) <i>Anak guru akan mendapat perlakuan khusus pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021. Mereka tak boleh tertolak di sekolah tempat orang tuanya mengajar. (D2)</i></p>	<p>Dinilai kooperatif selama pemeriksaan (D1)</p> <p>Anak guru (D2)</p>
			<p>Identifikasi menampilkan kelompok atau aktor-aktor sosial secara jelas misalnya kategori sosial, fisik, serta tindakan tertentu dengan menggunakan pemberian anak kalimat sehingga menampilkan makna tertentu.</p> <p>Kartu data identifikasi pada <i>E-paper</i> Harian Fajar dan <i>E-paper</i> media Indonesia:</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Pemecatan Guru Honorer dinilai Berlebihan” (<i>Edisi 11 Februari 2021</i>)</p>	

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>1) Guru honorer juga katanya, sangat dilematis karena tidak ada perlindungan dalam menjalankan tugas mereka. Sebab, mereka bisa dihentikan kapan saja. (D1)</p> <p>2) Sementara itu, Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi turut memberikan respons. Guru tersebut tidak diberhentikan. Melainkan, sudah banyak tenaga guru di sana. (D2)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Pemecatan Guru Honorer dinilai Berlebihan” (Edisi 11 Februari 2021)</p> <p>3) Guru honorer juga katanya, sangat dilematis karena tidak ada perlindungan dalam menjalankan tugas mereka. Sebab, mereka bisa dihentikan kapan saja. (D3)</p> <p>4) Sementara itu, Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi turut memberikan respons. Guru tersebut tidak diberhentikan. Melainkan, sudah banyak tenaga guru di sana. (D4)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Dorong Perbaikan Gaji Honorer” (Edisi 14 Februari 2021)</p> <p>5) Bahkan pemerintah sesungguhnya lebih memprioritaskan warga dari daerah terpencil itu sebagai ASN. Tidak perlu melalui mekanisme seperti ASN lainnya. (D5)</p>	<p>Guru honorer (D1)</p> <p>Guru tersebut tidak diberhentikan (D2)</p> <p>Guru honorer (D3)</p> <p>Guru tersebut tidak diberhentikan (D4)</p> <p>Warga dari daerah terpencil (D5)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>6) <i>Kepala Desa Sadar, Andi Sudi Alam, meminta kepada pihak terkait untuk tidak memberhentikan Hervina sebagai guru honorer. Namun, dicarikan solusi untuk kembali mengajar. Apalagi, dia telah mengabdikan puluhan tahun. (D6)</i></p> <p>7) <i>Sebab, terkadang guru bersatus ASN yang terangkat dan ditempatkan di Desa Sadar maupun Kecamatan Tellu Limpoe hanya aktif diawal-awal saja. Setelah beberapa lama meminta pindah. Padahal aturan menyebut siap ditempatkan di mana saja. (D7)</i></p> <p>8) <i>Hervina memiliki kepribadian baik sudah cukup mengabdikan. Yakni 16 tahun lamanya. ia aktif berkomunikasi dengan pemerintah desa (D8)</i></p> <p><i>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: Belum Ada Izin Belajar di Sekolah” (Edisi 5 Maret 2021)</i></p> <p>9) <i>Akan tetapi, saat baru berlangsung satu jam atau saat wali kelas mengajar pendidikan Agama Islam, petugas kepolisian datang dan membubarkan. (D9)</i></p>	<p>Hervina sebagai guru honorer. Namun, dicarikan solusi untuk kembali mengajar apalagi, dia telah mengabdikan puluhan tahun(D6)</p> <p>Guru berstatus ASN(D7)</p> <p>Ia aktif berkomunikasi dengan pemerintah desa(D8)</p> <p>Petugas kepolisian datang dan membubarkan (D9)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Kejati Bakal Tahan dua Tersangka Lagi” (<i>Edisi 12 Maret 2021</i>)</p> <p>10) <i>Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar akhirnya menahan satu tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020. Sementara dua tersangka lainnya segera menyusul. (D10)</i></p> <p>11) <i>BE alias Busra Edi merupakan wakil ketua penanggung jawab kegiatan pengelolaan DAK itu. Dia akan dititip di tahanan Polres Polman selama 20 hari ke depan. (D11)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Siswa Asrama Taruna diduga dilecehkan” (<i>Edisi 13 Maret 2021</i>)</p> <p>12) <i>Korban berbaring di tempat tidur. Kemudian DF, 30, selaku pembina asrama putra memanggil korban lalu mengajak korban ke kamar mandi pembina. (D12)</i></p> <p>13) <i>Meski korban menolak dengan mengancam akan melapor ke Bapak Andi (penanggung jawab asrama putra Sekolah Taruna Papua), DF balik</i></p>	<p>Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar akhirnya menahan satu tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Umum (DAK) Fisik 2020 (D10)</p> <p>BE alias Bursa Edi merupakan wakil ketua penanggung jawab kegiatan pengelolaan DAK itu (D11)</p> <p>Selaku pembina asrama putra memanggil korban lalu mengajak korban ke kamar mandi pembina (D12)</p> <p>DF balik mengancam akan</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>mengancam akan memukul korban (D13)</i></p> <p>14) <i>DF berhenti saat sejumlah anakanak lain memanggil-manggil nama ST. Mendengar itu, DF menyuruh ST keluar dari kamar mandi (D14)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Tetap Mengajar Meski Belum digaji” (Edisi 6 Mei 2021)</p> <p>15) <i>Guru honorer Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar diliputi kegelisahan. Gaji Maret-April yang mestinya telah cair tak kunjung diterima. (D15)</i></p> <p>16) <i>Keterlambatan pembayaran gaji guru honorer tak hanya terjadi di Pemkot Makassar. Masalah sama juga terjadi di Pemprov Sulsel. (D16)</i></p>	<p>memukul korban (D13)</p> <p>Mendengar itu, DF menyuruh ST keluar dari kamar mandi (D14)</p> <p>Guru honorer Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar (D15)</p> <p>Gaji guru honorer (D16)</p>
			<p>Determinasi merupakan strategi dengan menyebutkan kelompok atau aktor-sosial secara anonim agar wartawan lebih aman menulis berita misalnya menggunakan banyak orang, sebgaaian orang, dan</p>	

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>beberapa orang yang digunakan digunakan dalam bentuk prulal.</p> <p>Kartu data identifikasi pada <i>E-paper</i> Harian Fajar dan <i>E-paper</i> media Indonesia:</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Rekrutmen Guru PPPK Diskriminatif” (<i>Edisi 2 Januari 2021</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Pengamat pendidikan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Erwin Akib menilai, kebijakan menghapus rekrutmen calon aparatut sipil negara (CASN) untuk profesi guru bisa mematikan langkah para calon tenaga pendidik. (D1)</i> 2) <i>Rata-rata mahasiswa yang masuk dalam dunia pendidikan melihat peluang besar. (D2)</i> 3) <i>Dia meminta kebijakan ini dikaji lebih jauh. Sebab, ada kesan profesi guru tidak lagi penting. Mseki pun niat pemerintah ingin memberi kemudahan kepada para tenaga pendidik. (D3)</i> 	<p>Para calon tenaga pendidik (D1)</p> <p>Rata-rata mahasiswa (D2)</p> <p>Para tenaga pendidik (D3)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian fajar “Judul Berita: Kejari Luwu Sita Dua Koper Dokumen” (<i>Edisi 27 Januari 2021</i>)</p> <p>4) Saat pemeriksaan para tersangka hanya membawa dokumen foto kopi (D4)</p> <p>5) Terkait dengan tiga tersangka, Erny mengaku, tidak dikakukan penahanan. Alasannya, para tersangka dinilai kooperatif selama pemeriksaan (D5)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: ‘Karpas Merah’ untuk Anak Guru” (<i>Edisi 4 Februari 2021</i>)</p> <p>6) Para kasek menolak, jika jatah kuota untuk tenaga pengajar merupakan sisa dari kuota jalur perpindahan orang tua yang tak terpenuhi. (D6)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Pemecatan Guru Honorer dinilai Berlebihan” (<i>Edisi 11 Februari 2021</i>)</p> <p>7) Sementara itu, Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi turut memberikan respons. Guru tersebut tidak diberhentikan. Melainkan, sudah banyak tenaga guru di sana. (D7)</p>	<p>Para tersangka (D4)</p> <p>Para tersangka (D5)</p> <p>Para kasek (D6)</p> <p>Banyak tenaga guru (D7)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Dorong Perbaikan Gaji Honorer” (<i>Edisi 14 Februari 2021</i>)</p> <p>8) Kasus yang menimpa <i>Hervina</i>, harus menjadi perhatian serius. Masih banyak Hervina lainnya yang ikut terancam dipecat. (D8)</p> <p>9) <i>Andi Sudi</i> meminta para pemangku kebijakan untuk memperhatikan nasib para guru honorer di <i>Desa Sadar</i>, termasuk seluruh guru honorer di <i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>. (D9)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Kejati Bakal Tahan dua Tersangka Lagi” (<i>Edisi 12 Maret 2021</i>)</p> <p>10) Para tersangka beralih untuk biaya jasa pembuatan dokumen perencanaan berupa <i>Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)</i>. (D10)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Siswa Asrama Taruna diduga dilecehkan” (<i>Edisi 13 Maret 2021</i>)</p> <p>11) <i>Sedikitnya 25 orang siswasiswi Sekolah Berpola Asrama Taruna Papua Timika</i> diduga mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Pelakunya oleh seorang oknum pembina asrama (D11)</p>	<p>Banyak hervina lainnya (D8)</p> <p>Para pemangku kebijakan, para guru honorer (D9)</p> <p>Para tersangka (D10)</p> <p>Pelakunya oleh seorang oknum pembina asrama (D11)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Tetap Mengajar Meski Belum digaji” (Edisi 6 Mei 2021)</p> <p>12) <i>Koordinator aksi yang juga tenaga honorer di SDN 2 Mamajang, Ardi menyebut aksi damai sebagai wujud keresahan para guru. (D12)</i></p> <p>13) <i>Tak kuasa menahan kecewa, para guru honorer SDN-SMPN akhirnya meluapkannya di depan Kantor Dinas Pendidikan Makassar, Rabu, 5 Mei. Mereka mencari kepastian. Apalagi di tengah mendesaknya kebutuhan menjelang Idulfitri. (D13)</i></p> <p>14) <i>Aksi para guru honorer pun mendapat respons pihak disdik. Kata Ardi, dirinya sudah bertemu langsung Plt Kepala Disdik Makassar, Nielma Palamba. (D14)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: diduga Korupsi Bos Kantor Disdik digeleda” (Edisi 28 Mei 2021)</p> <p>15) <i>Menurutnya, setiap warga negara termasuk pejabat, punya hak yang sama dihadapan hukum. Sehingga tidak ada masalah ketika para pejabat terkait harus diperiksa demi hukum. (D15)</i></p>	<p>Para guru (D12)</p> <p>Para guru honorer SDN-SMPN (D13)</p> <p>Para guru honorer (D14)</p> <p>Para pejabat (D15)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Media Indonesia “Judul Berita: ASN DKI Terbukti Korupsi di Sekolah” (<i>Edisi 27 Mei 2021</i>)</p> <p>16) <i>Kasi Penerangan Hukum Kejati DKI Ashari Syam mengatakan kedua ASN DKI itu telah menjadi tersangka (D16)</i></p> <p>17) <i>Kepala Seksi Pidana Khusus kejar Jakbar Reopan Saragih mengatakan dana BOP tahun anggaran 2018 mengalir ke para guru di SMKN 53 jakbar. (D17)</i></p> <p>18) <i>Para guru menerima dana sebesar Rp1 juga-Rp 2 juta dari hasil korupsi dana BOP itu. (D18)</i></p> <p>19) <i>Widodo mengaku uang itu diberikan sebagai honor tambahan untuk para guru. (D19)</i></p>	<p>Kedua ASN DKI (D16)</p> <p>Para guru (D17)</p> <p>Para guru (D18)</p> <p>Para guru (D19)</p>
			<p>Indeterminasi merupakan menggambarkan aktor dengan menampilkan nama atau ciri umum secara jelas.</p> <p>Kartu data indeterminasi pada <i>E-paper</i> Harian Fajar dan <i>E-paper</i> media Indonesia:</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Rekrutmen Guru PPPK Diskriminatif” (<i>Edisi 2 Januari 2021</i>)</p> <p>1) <i>Pengamat pendidikan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Erwin Akib menilai, kebijakan menghapus rekrutmen calon aparat sipil negara (CASN) untuk profesi guru bisa mematikan langkah para calon tenaga pendidik. (D1)</i></p>	<p>Erwin Akib (D1)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>2) <i>Seharusnya, tegas Erwin, pemerintah memperhatikan profesi guru. Terutama aspek kesejahteraan dan jenjang karier. (D2)</i></p> <p>3) <i>Erwin mengungkapkan, masih banyak solusi yang bisa dilakukan untuk mengatur persoalan-persoalan yang ada saat ini. (D3)</i></p> <p>4) <i>Mahasiswi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Makassar (UNM), Andi Tenri Abeng juga menilai kebijakan ini mendiskriminasi profesi guru. (D4)</i></p> <p>5) <i>Ketua Ikatan Guru Honorer Indonesia Kawasan Timur, Ali Kham menyayangkan kebijakan pemerintah yang hanya menerima guru jalur PPPK. (D5)</i></p> <p>6) <i>Saat awal pemerintahan, Jokowi langsung melakukan moratorium. Padahal, kekurangan guru sangat besar. (D6)</i></p> <p>7) <i>Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Hery Sumiharto mengatakan, pengangkatan guru jalur PPPK sudah menjadi kebijakan pusat. (D7)</i></p> <p>8) <i>Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Muhammad Jufri juga mengakui pasti ada pihak yang tentu kecewa atas kebijakan ini. (D8)</i></p> <p>9) <i>Kepala Kantor Regional BKN Wilayah IV Makassar, Harun Arsyad mengatakan,</i></p>	<p>Erwin (D2)</p> <p>Erwin (D3)</p> <p>Andi Tenri Abeng (D4)</p> <p>Ali Khan (D5)</p> <p>Jokowi (D6)</p> <p>Hery Sumiharto (D7)</p> <p>Muhammad Jufri (D8)</p> <p>Harun Arsyad (D9)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>kebijakan untuk memberdayakan PPPK sudah diambil oleh Pemerintah Pusat. (D9)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian fajar “Judul Berita: Kejari Luwu Sita Dua Koper Dokumen” (<i>Edisi 27 Januari 2021</i>)</p> <p>10) <i>Terkait dengan tiga tersangka, Erny mengaku, tidak dikakukan penahanan. Alasannya, para tersangka dinilai kooperatif selama pemeriksaan (D10)</i></p> <p>11) <i>Tiga tersangka dalam kasus ini yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Andi Asnawi, Fadli Fatahuddin (rekanan), dan Ibnu Harista (rekanan) (D11)</i></p> <p>12) <i>Kasi Intel Kejari, Luwu, Jainurdin mengakui, dokumen yang diambil akan menjadi barang bukti dalam kasus korupsi pengadaan seragam sekolah untuk SD dan SMP tahun 2019 (D12)</i></p> <p>13) <i>Sementara itu, Kepala Kejari Luwu, Erny Veronica Maramba mengatakan, dokumen yang disita ini sangat mendukung proses pembuktian dipersidangan nanatinya (D13)</i></p> <p>14) <i>Terkait dengan tiga tersangka, Erny mengaku, tidak dilakukan penahanan. Alasannya, para tersangka tdinilai kooperatif selama pemeriksaan. Pertimbangan lain karena saat ini</i></p>	<p>Erny (D10)</p> <p>Andi Asnawi, Fadli Fatahuddin, dan Ibnu Harista (D11)</p> <p>Jainurdin (D12)</p> <p>Erny Veronyca Maramba (D13)</p> <p>Erny (D14)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>masa pandemi. (D14)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: ‘Karpas Merah’ untuk Anak Guru” (<i>Edisi 4 Februari 2021</i>)</p> <p>15) Kepala SMAN 20 Makassar Mirsan Midding menolak adanya aturan tersebut. Menurutnya anak guru mesti mendapat kuota khusus. (D15)</p> <p>16) Hal yang sama juga diungkapkan Kasek SMAN 2 Makassar, Asrar. Menurutnya prioritas harus diberikan kepada anak guru. (D16)</p> <p>17) Tim Ahli Disdik Sulsel, Syarifuddin sempat memberikan gambaran, jika kuota perpindahan siswa dalam satu sekolah hanya 10 orang.(D17)</p> <p>18) Kepala bida pembinaan SMA Disdik Sulsel, Idrus mengatakan , perancangan draft PPDB baru akan dilakukan(D18)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Pemecatan Guru Honorer dinilai Berlebihan” (<i>Edisi 11 Februari 2021</i>)</p> <p>19) Hervina menjadi salah seorang guru honorer di SD 169 Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone yang dipecat sepihak oleh sekolah. (D19)</p> <p>20) Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI),</p>	<p>Mirsan Midding (D15)</p> <p>Asrar (D16)</p> <p>Syarifuddin (D17)</p> <p>Idrus (D18)</p> <p>Hervina (D19)</p> <p>Muhammad</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>Muhammad Ramli Rahim</i> menilai, pemecatan ini berlebihan. (D20)</p> <p>21) Sementara itu, Bupati Bone, <i>Andi Fahsar Mahdin Padjalangi</i> turut memberikan respons. Guru tersebut tidak diberhentikan. Melainkan, sudah banyak tenaga guru di sana. (D21)</p> <p>22) Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, <i>Andi Muhammad Salam</i> menyangkan insiden tersebut. (D22)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Dorong Perbaikan Gaji Honorer” (Edisi 14 Februari 2021)</p> <p>23) Kasus yang menimpa <i>Hervina</i>, harus menjadi perhatian serius. Masih banyak <i>Hervina</i> lainnya yang ikut terancam dipecat. (D23)</p> <p>24) Anggota DPR RI, <i>Muhammad Aras</i> menegaskan, jangan hanya karena gara-gara memposting gaji di media sosial yang diperoleh selama 4 bulan sebesar Rp700 ribu, lalu secara sepihak diberhentikan sebagai guru honorer di SDN 169 Sadar, Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe. (D24)</p> <p>25) Kepala Desa Sadar, <i>Andi Sudi Alam</i>, meminta kepada pihak terkait untuk tidak memberhentikan <i>Hervina</i> sebagai guru honorer. Namun, dicarikan solusi untuk kembali mengajar. Apalagi, dia telah mengabdikan puluhan tahun. (D25)</p> <p>26) Kata dia, <i>Hervina</i> memiliki kepribadian baik.</p>	<p>Ramli Rahim (D20)</p> <p>Andi Fahsar Madin Padhalangi (D21)</p> <p>Andi Muhammad Salam (D22)</p> <p>Hervina (D23)</p> <p>Muhammad Asras (D24)</p> <p>Andi Sudi Alam (D25)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>Sudah cukup mengabdikan. Yakni sekitar 16 tahun lamanya. Ia aktif berkomunikasi dengan pemerintah desa maupun masyarakat. (D26)</i></p> <p>27) <i>Kepala Desa Sadar Andi Sudi meminta para pemangku kebijakan untuk memperhatikan nasib para guru honorer di Desa Sadar, termasuk seluruh guru honorer di Kecamatan Tellu Limpoe. (D27)</i></p> <p><i>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: Belum Ada Izin Belajar di Sekolah” (Edisi 5 Maret 2021)</i></p> <p>28) <i>Kepala MAN II Model Makassar, Kaharuddin mengakui itu. Hanya saja, ia mengatakan, sebelum aktivitas belajar, pihaknya sudah menyurati orang tua siswa untuk meminta izin. (D28)</i></p> <p>29) <i>Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Zulfa mengatakan, sekolah ataupun Dinas Pendidikan Sulsel belum menyampaikan adanya rencana membuka aktivitas belajar. Makanya, sekolah yang melaksanakan kegiatan itu akan ditertibkan. (D29)</i></p> <p>30) <i>Sekretaris Satgas Covid-19 Sulsel, Ni'mal Lahamang juga menegaskan tren kasus Covid-19 masih cukup tinggi. Mencapai 200 kasus. (D30)</i></p> <p>31) <i>Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, Khaeroni mengaku jika masalah</i></p>	<p>Hervina (D26)</p> <p>Andi Sudi (D27)</p> <p>Kaharuddin (D28)</p> <p>Zulfa (D29)</p> <p>Ni'mal Lahamang (D30)</p> <p>Khaeroni (D31)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>penghentian belajar tatap muka sudah tuntas. (D31)</i></p> <p>32) <i>Ditambahkan, Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Hery Sumoharto, edaran gubernur untuk aktivitas belajar daring masih berlaku hingga 1 April. (D32)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Kejati Bakal Tahan dua Tersangka Lagi” (<i>Edisi 12 Maret 2021</i>)</p> <p>33) <i>BE alias Busra Edi merupakan wakil ketua penanggung jawab kegiatan pengelolaan DAK itu. Dia akan dititip di tahanan Polres Polman selama 20 hari ke depan. (D33)</i></p> <p>34) <i>Untuk dua tersangka lainnya yakni mantan Kabid SMA yang menjadi ketua penanggung jawab DAK itu, Burhanuddin Bohari dan koordinator fasilitator, Aking Djide juga segera akan ditahan. (D34)</i></p> <p>35) <i>Terkait peran Busra, Feri mengaku belum bisa diberberkan, pasalnya masih tahap pengembangan penyidikan. (D35)</i></p> <p>36) <i>Jelasnya, kata Feri, Busra Edi selaku staf pada Bidang PSMA, bersama-sama dengan Burhanuddin dan Kordinator fasilitaor Aking Djide meminta “jatah” tiga persen kepada 82 kepala sekolah penerima DAK. (D36)</i></p>	<p>Hery Sumiharto (D32)</p> <p>Bursa Edi (D33)</p> <p>Burhanuddin Bohari dan Aking Djide (D34)</p> <p>Bursa, Feri (D35)</p> <p>Feri, Bursa Edi (D36)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>37) Tersangka Busra Edi saat akan dibawa ke Polres Polman tidak memberi sepatah kata pun ke awak media usai resmi mengenakan rompi oranye. (D37)</p> <p>38) Kepala seksi Penerangan Hukum Kejati Sulbar, Amiruddin menambahkan penyidik punya waktu 20 hari untuk membawa berkas Burhanuddin ke meja hijau. (D38)</p> <p>39) Busra disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 atau Pasal 12 huruf e atau jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (D39)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Siswa Asrama Taruna diduga dilecehkan” (Edisi 13 Maret 2021)</p> <p>40) Kepala Satuan Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto seperti dilansir dari Antara di Timika mengatakan, kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa puluhan siswa Sekolah Taruna Papua itu terjadi sejak November 2020 hingga 9 Maret 2021. (D40)</p>	<p>Bursa Edi (D37)</p> <p>Amiruddin (D38)</p> <p>Bursa (D39)</p> <p>AKP Hermanto (D40)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>41) <i>Selanjutnya DF membuka pakaian korban. Meski korban menolak dengan mengancam akan melapor ke Bapak Andi (penanggung jawab asrama putra Sekolah Taruna Papua), DF balik mengancam akan memukul korban. (D41)</i></p> <p><i>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: diduga Peras 82 Kepsek Fasilitator DAK ditahan” (Edisi 20 Maret 2021)</i></p> <p>42) <i>Koordinator tim fasilitator DAK Sulbar, Aking Djide resmi ditahan Kejati Sulbar. Dia ditetapkan tersangka diduga telah memeras 82 kepala sekolah (Kepsek) menengah atas di Sulbar. (D42)</i></p> <p>43) <i>Aking diduga minta fee tiga persen dari DAK fisik 2020 yang mengucur ke seluruh SMA se Sulbar. (D43)</i></p> <p>44) <i>Selain Aking, Kejati juga sebelumnya telah menahan Staf Bidang SMA Disdik Sulbar, Busra Edi, Rabu 10 Maret lalu. (D44)</i></p> <p>45) <i>Sehingga tersisa satu tersangka lagi yang belum ditahan, yakni Burhanuddin Bohari, Kepala Bidang SMA selaku penanggung jawab DAK 2020 Rp202 miliar itu. (D45)</i></p> <p>46) <i>Kebijakan meminta tiga persen itu, lanjut Feri,</i></p>	<p>Bapak Andi (D41)</p> <p>Aking Djide (D42)</p> <p>Aking (D43)</p> <p>Aking (D44)</p> <p>Burhanuddin Bohari (D45)</p> <p>Feri (D46)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>diduga melanggar Permendikbud 11/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (D56)</i></p> <p>47) <i>Aking resmi ditahan usai menjalani pemeriksaan sejak pagi hingga sore di Kantor Kejati Jl RE Martadinata, Kamis, 18 Maret. (D47)</i></p> <p>48) <i>Sebelumnya, mantan Kabid SMA Sulbar Burhanuddin Bohari mengaku siap menjalani proses hukum usai ditetapkan sebagai tersangka. (D48)</i></p> <p><i>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: 50 Persen Kasek-Guru Suka Pungli” (Edisi 5 Apri 2021)</i></p> <p>49) <i>Wali Kota Makassar, M Ramdhan Pomanto mengaku sudah membuatkan tekad untuk melakukan mutasi. (D49)</i></p> <p>50) <i>Ketua Ombudsman Kota Makasaar, Andi Ihwan Patiroy mengungkapkan, sektor paling tinggi pelanggaran maladministrasinya yaitu Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar. Dia mencatat ada 22 laporan yang diterima sepanjang tahun lalu. (D50)</i></p>	<p>Aking (D47)</p> <p>Burhanuddin Bohari (D48)</p> <p>M Ramdhan Pomanto (D49)</p> <p>Andi Ihwan Patiory (D50)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>51) <i>Komisioner Ombudsman, Muhammad Irwan juga meminta Disdik segera melakukan evaluasi. Sebab, dia menilai ada banyak hal pada sistem PPDB yang masih perlu diperbaiki. (D51)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Tetap Mengajar Meski Belum digaji” (Edisi 6 Mei 2021)</p> <p>52) <i>Koordinator aksi yang juga tenaga honorer di SDN 2 Mamajang, Ardi menyebut aksi damai sebagai wujud keresahan para guru. (D52)</i></p> <p>53) <i>Ardi dan rekan guru honorer yang lain tak ingin konsentrasi pecah hanya karena persoalan gaji. (D53)</i></p> <p>54) <i>Aksi para guru honorer pun mendapat respons pihak disdik. Kata Ardi, dirinya sudah bertemu langsung Plt Kepala Disdik Makassar, Nielma Palamba. (D54)</i></p> <p>55) <i>Aksi para guru honorer pun mendapat respons pihak disdik. Kata Ardi, dirinya sudah bertemu langsung Plt Kepala Disdik Makassar, Nielma Palamba. (D55)</i></p> <p>56) <i>Ardi mengungkapkan, hasil pertemuan dengan disdik mengungkap alasan gaji tak kunjung cair. Pemkot bukannya defisit anggaran, namun SK perpanjangan tenaga guru kontrak tak kunjung</i></p>	<p>Muhammad Irwan (D51)</p> <p>Ardi (D52)</p> <p>Ardi (D53)</p> <p>Ardi (D54)</p> <p>Nielma Palamba (D55)</p> <p>Rudi Djamaluddin (D56)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>ditandatangani Rudy Djamaluddin saat menjadi Penjabat Wali Kota. (D56)</p> <p>57) Guru honorer SMPN 7 Makassar Fahmi S, juga tak kuasa menahan kecewa. Tertahannya gaji justru di saat kebutuhan begitu mendesak. Saat menjelang Lebaran dan himpitan ekonomi yang sulit di tengah pandemi. (D57)</p> <p>58) Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto juga tak bisa berbuat banyak. Menurut dia, guru honorer turun aksi, sudah ada keluh kesah dari beberapa guru. (D58)</p> <p>59) Danny pun sudah berkonsultasi. Salah satu opsinya agar SK bisa diperpanjang tangankan dengan mendelegasikan ke Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Muh Ansar. (D59)</p> <p>60) Plt Kepala Disdik Makassar, Nielma Palamba berjanji sebelum Idulfitri, semua gaji honorer tuntas. (D60)</p> <p>61) Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Andi Siswanta Attas menjelaskan, permasalahan belum terbayarkannya gaji guru karena SK perpanjangan kontrak mereka sejak Januari 2021 lalu hingga saat ini belum juga diteken. (D61)</p>	<p>Fahmi S (D57)</p> <p>Moh Ramdhan Pamanto (D58)</p> <p>Danny (D59)</p> <p>Nielma Palamba (D60)</p> <p>Andi Siswanta Attas (D61)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>62) <i>Sejauh ini, pihaknya telah menemui Rudy Djamaluddin. Namun, Kepala Dinas PUTR Sulsel itu tak kunjung menandatangani SK tersebut. (D62)</i></p> <p>63) <i>Ditegaskannya bahwa SK itu bisa saja ditandatangani Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pamanto. Akan tetapi, punya konsekuensi. Mereka hanya tercatat di bulan Maret dan April saja. Tidak dari Januari. (D63)</i></p> <p>64) <i>Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Helmy Budiman menjelaskan anggaran untuk gaji tersebut sudah tersedia. Telah tersedia untuk 12 bulan sebagai mana perpanjangan kontrak mereka. (D64)</i></p> <p>65) <i>Ketua Ikatan Guru Honorer Indonesia Kawasan Timur, Ali Khan menyayangkan lambatnya langkah pemerintah membayar gaji guru honorer. Padahal mereka sudah bekerja layaknya guru ASN selama empat bulan terakhir. (D65)</i></p> <p>66) <i>Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Hery Sumiharto mengakui pembayaran upah honorer masih tertahan. (D66)</i></p>	<p>Rudy Djamaluddin (D62)</p> <p>Moh Ramdhan Pamanto (D63)</p> <p>Helmy Budiman (D64)</p> <p>Ali Khan (D65)</p> <p>Heru Sumiharto (D66)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: diduga Korupsi Bos Kantor Disdik digeleda” (<i>Edisi 28 Mei 2021</i>)</p> <p>67) <i>Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Barat Edwin Beslar</i> membenarkan penggeledahan tersebut. Dia menyebut penggeledahan dilakukan di dua tempat berbeda. (D67)</p> <p>68) <i>Edwin</i> merinci, selain Kantor Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, penyidik Kejaksaan juga menggeledah SMKN 53 Cengkareng guna proses penyidikan lebih lanjut pada Senin, 24 Mei lalu. (D68)</p> <p>69) Sayangnya, <i>Edwin</i> tidak menyebutkan barang bukti atau dokumen yang disita petugas. Namun dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan terkait dana BOS dan BOP Tahun Anggaran 2018-2019 (D69)</p> <p>70) Wakil Gubernur DKI Jakarta <i>Ahmad Riza Patria</i> mempersilakan pejabat-pejabat yang terkait kasus dugaan korupsi BOP dan BOS diperiksa. (D70)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Salah Input, Potongan Sertifikasi dikembalikan” (<i>Edisi 31 Mei 2021</i>)</p> <p>71) <i>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i></p>	<p>Edwin Beslar (D57)</p> <p>Edwin (D68)</p> <p>Edwin (D69)</p> <p>Ahman Riza Patria (D70)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>(Disdikbud) Parepare, Arifuddin Idris menjelaskan, kesalahan tersebut dilakukan oleh operator. Ia membantah jika dana yang terpotong itu masuk ke kas Disdikbud. (D71)</i></p> <p>72) <i>Arifuddin menambahkan, pengembalian dilakukan langsung ke rekening masing-masing guru. (D72)</i></p> <p>73) <i>Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Jamaluddin Achmad, menambahkan, pihaknya telah melakukan permintaan pengembalian kelebihan pemotongan tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). (D73)</i></p> <p><i>E-paper Media Indonesia “Judul Berita: ASN DKI Terbukti Korupsi di Sekolah” (Edisi 27 Mei 2021)</i></p> <p>74) <i>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilahkan pihak penegak hukum untuk memeriksa ASN Pemprov DKI yang diduga terkait dengan tindakan pidana korupsi dan tindak pidanan lainnya. (D74)</i></p> <p>75) <i>Kasi Penerangan Hukum Kejati DKI Ashari Syam mengatakan kedua ASN DKI itu telah menjadi tersangka (D75)</i></p> <p>76) <i>Kepala Seksi Pidana Khusus kejar Jakbar Reopan Saragih mengatakan dana BOP tahun anggaran 2018 mengalir ke para guru di SMKN 53 jakbar. (D76)</i></p>	<p>Arifuddin Idris (D71)</p> <p>Arifuddin (D72)</p> <p>Jamaluddin Achmad (D73)</p> <p>Ahmad Riza Patri (D74)</p> <p>Ashari Syam (D75)</p> <p>Reopan Saragih (D76)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>Asimilasi merupakan strategi kelompok atau aktor-aktor sosial dengan menyertakan komunitas atau kelompok sosial, sehingga dapat memberikan efek generalisasi kepada pembaca.</p> <p>Kartu data asimilasi pada <i>E-paper</i> Harian Fajar dan <i>E-paper</i> media Indonesia:</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Rekrutmen Guru PPPK Diskriminatif” (<i>Edisi 2 Januari 2021</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah menutup rekrutmen guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) pada 2021. Kebijakan ini dinilai mendiskriminasi profesi guru. (D1) 2) Menurutny, alasan pemerataan yang digaungkan pemerintah, perlu dikaji ulang. (D2) 3) Saat ini, desakan guru honorer yakni tetap diangkat menjadi CASN. (D3) 4) Apalagi posisi pendidik punya potensi besar untuk terangkat menjadi ASN. (D4) 5) Kepala Kantor Regional BKN Wilayah IV Makassar, Harun Arsyad mengatakan, kebijakan untuk memberdayakan PPPK sudah diambil oleh Pemerintah Pusat. (D5) 	<p>Pemerintah (D1)</p> <p>Pemerintah (D2)</p> <p>Guru honorer (D3)</p> <p>Penyidik (D4)</p> <p>Pemerintah pusat (D5)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian fajar “Judul Berita: Kejari Luwu Sita Dua Koper Dokumen” (<i>Edisi 27 Januari 2021</i>)</p> <p>6) Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekertarian Daerah Kabupaten Luwu, Selasa, 26 Januari. (D6)</p> <p>7) Hasil pantauan FAJAR, tim penyidik yang dikawal aparat Polres Luwu bersenjata lengkap mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Luwu sekira pukul 14.00 Wita dan langsung menggeledah ruang bagian keuangan. (D7)</p> <p>8) Menurutnya, pengeledangan dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan negeri (PN) Luwu. (D8)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: ‘Karpas Merah’ untuk Anak Guru” (<i>Edisi 4 Februari 2021</i>)</p> <p>9) Kepala SMAN 20 Makassar Mirsan Midding menolak adanya aturan tersebut. Menurutnya anak guru mesti mendapat kuota khusus. (D9)</p> <p>10) Tim Ahli Disdik Sulsel, Syarifuddin sempat memberikan gambaran, jika kuota perpindahan siswa dalam satu sekolah hanya 10 orang. (D10)</p>	<p>Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu (D6)</p> <p>Aparat polres Luwu (D7)</p> <p>Pengadilan negeri (PN) Luwu (D8)</p> <p>Kepala SMAN 20 Makassar (D9)</p> <p>Tim Ahli Disdik Sulsel (D10)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Pemecatan Guru Honorer dinilai Berlebihan” (<i>Edisi 11 Februari 2021</i>)</p> <p>11) <i>Kata dia, kepala sekolah dengan guru honorer tersebut harus kembali dipertemukan. (D11)</i></p> <p>12) <i>Kata dia, kepala sekolah dengan guru honorer tersebut harus kembali dipertemukan. (D12)</i></p> <p>13) <i>Sementara itu, Bupati Bone, Andi Fashar Mahdin Padjalangi turut memberikan respons. Guru tersebut tidak diberhentikan. Melainkan sudah banyak tenaga guru di sana (D13)</i></p> <p>14) <i>Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Muhammad Salam menyayangkan inseden tersebut Menurutnya, setelah Musrembang selesai pihaknya akan memanggil Disdik dan kepala sekolah tersebut. (D14)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Dorong Perbaikan Gaji Honorer” (<i>Edisi 14 Februari 2021</i>)</p> <p>15) <i>Menurutnya, soal postingan di media sosial (medsos) paling tidak publik juga harus tahu perjuangan honorer dengan gajinya itu (D15)</i></p> <p>16) <i>Ini momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki gaji honorer. Baik pemda maupun pusat. (D16)</i></p>	<p>Kepala sekolah (D11)</p> <p>Guru honorer (D12)</p> <p>Guru (D13)</p> <p>Disdik dan kepala sekolah (D14)</p> <p>Honorer (D15)</p> <p>Pemda (D16)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>17) <i>Terlepas dari itu, kata dia, semua pemerintah harus lebih memperhatikan nasib guru honorer. Sebab, jumlah honorer lebih banyak di daerah terpencil dibanding ASN. (D17)</i></p> <p>18) <i>Bahkan pemerintah sesungguhnya lebih memprioritaskan warga dari daerah terpencil itu sebagai ASN. Tidak perlu melalui mekanisme seperti ASN lainnya. (D18)</i></p> <p>19) <i>Terkadang guru berstatus ASN yang terangkat dan ditempatkan di Desa Sadar maupun Kecamatan Tellu Limpoe hanya aktif diawal-awal saja. (D19)</i></p> <p>20) <i>Kata dia, Hervina memiliki kepribadian baik. Sudah cukup mengabdikan. Yakni sekitar 16 tahun lamanya. Ia aktif berkomunikasi dengan pemerintah desa maupun masyarakat. (D20)</i></p> <p>21) <i>Andi Sudi meminta para pemangku kebijakan untuk memperhatikan nasib para guru honorer di Desa Sadar, termasuk seluruh guru honorer di Kecamatan Tellu Limpoe. (D21)</i></p> <p><i>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: Belum Ada Izin Belajar di Sekolah” (Edisi 5 Maret 2021)</i></p> <p>22) <i>Belajar tatap muka di sekolah belum mendapat restu Polda Sulsel. (D22)</i></p>	<p>Pemerintah; guru honorer (D17)</p> <p>Pemerintah (D18)</p> <p>Guru berstatus ASN (D19)</p> <p>Pemerintah desa; Masyarakat (D20)</p> <p>Guru honorer (D21)</p> <p>Polda Sulsel (D22)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>23) <i>Rabu, 3 Maret, MAN II Model Makassar merasakan tindakan tegas kepolisian. (D23)</i></p> <p>24) <i>Kepala MAN II Model Makassar, Kaharuddin mengakui itu. Hanya saja, ia mengatakan, sebelum aktivitas belajar, pihaknya sudah menyurati orang tua siswa untuk meminta izin. (D24)</i></p> <p>25) <i>Akan tetapi, saat baru berlangsung satu jam atau saat wali kelas mengajar pendidikan Agama Islam, petugas kepolisian datang dan membubarkan. (D25)</i></p> <p>26) <i>Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Zulfa mengatakan, sekolah ataupun Dinas Pendidikan Sulsel belum menyampaikan adanya rencana membuka aktivitas belajar. Makanya, sekolah yang melaksanakan kegiatan itu akan ditertibkan. (D26)</i></p> <p>27) <i>Ditambahkan, Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Hery Sumoharto, edaran gubernur untuk aktivitas belajar daring masih berlaku hingga 1 April. (D27)</i></p> <p>28) <i>Ia pun berharap setiap sekolah bisa berkoordinasi dengan Satgas kabupaten/ kota dan Disdik Sulsel jika hendak membuka belajar tatap muka. (D28)</i></p>	<p>Kepolisian (D23) Orang tua siswa (D24)</p> <p>Wali kelas (D25)</p> <p>Sekolah; dinas Pendidikan Sulsel (D16)</p> <p>Gubernur (D27)</p> <p>Satgas kabupaten/kota dan Disdik Sulsel (D28)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Kejati Bakal Tahan dua Tersangka Lagi” (<i>Edisi 12 Maret 2021</i>)</p> <p>29) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar akhirnya menahan satu tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020. Sementara dua tersangka lainnya segera menyusul. (D29)</p> <p>30) Jelasnya, kata Feri, Busra Edi selaku staf pada Bidang PSMA, bersama-sama dengan Burhanuddin dan Kordinator fasilitator Aking Djide meminta “jatah” tiga persen kepada 82 kepala sekolah penerima DAK. (D30)</p> <p>31) Kepala seksi Penerangan Hukum Kejati Sulbar, Amiruddin menambahkan penyidik punya waktu 20 hari untuk membawa berkas Burhanuddin ke meja hijau. (D31)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Siswa Asrama Taruna diduga dilecehkan” (<i>Edisi 13 Maret 2021</i>)</p> <p>32) Sedikitnya 25 orang siswa siswi Sekolah Berpola Asrama Taruna Papua Timika diduga mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Pelakunya oleh seorang oknum pembina asrama. (D32)</p> <p>33) Kepala Satuan Reskrim Polres Mimika AKP</p>	<p>Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulbar (D29)</p> <p>Kepala sekolah (D30)</p> <p>Penyidik (D31)</p> <p>25 orang siswa siswi (D31)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>Hermanto seperti dilansir dari Antara di Timika mengatakan, kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa puluhan siswa Sekolah Taruna Papua itu terjadi sejak November 2020 hingga 9 Maret 2021. (D33)</i></p> <p>34) <i>Kasus itu baru terungkap setelah seorang siswa berusia enam tahun berinisial ST melaporkan kepada pembina asrama dan kepala sekolah Taruna Papua. (D34)</i></p> <p>35) <i>Korban berbaring di tempat tidur. Kemudian DF, 30, selaku pembina asrama putra memanggil korban lalu mengajak korban ke kamar mandi pembina. (D35)</i></p> <p>36) <i>Selanjutnya DF membuka pakaian korban. Meski korban menolak dengan mengancam akan melapor ke Bapak Andi (penanggung jawab asrama putra Sekolah Taruna Papua), DF balik mengancam akan memukul korban. (D36)</i></p> <p>37) <i>Sejumlah anak yang mengalami peristiwa serupa juga melaporkan pengalamannya kepada pembina asrama dan kepala sekolah. (D37)</i></p> <p>38) <i>Tindak kekerasan DF tidak saja menimpa siswa laki-laki di asrama putra Sekolah Taruna Papua, tapi juga dialami juga siswi di sekolah itu. (D38)</i></p> <p>39) <i>Demikian juga dengan pihak Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan</i></p>	<p>Siswa (D33)</p> <p>Pembina asrama dan kepala sekolah (D34)</p> <p>Korban (D35)</p> <p>Korban (D36)</p> <p>Pembina asrama dan kepala sekolah (D37)</p> <p>Siswa laki-laki (D38)</p> <p>Pihak Yayasan Pemberdayaan</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>Kamoro belum bersedia memberikan keterangan. (D38)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: diduga Peras 82 Kepsek Fasilitator DAK ditahan” (<i>Edisi 20 Maret 2021</i>)</p> <p>40) <i>Koordinator tim fasilitator DAK Sulbar, Aking Djide resmi ditahan Kejati Sulbar. Dia ditetapkan tersangka diduga telah memeras 82 kepala sekolah (Kepsek) menengah atas di Sulbar. (D40)</i></p> <p>41) <i>Permintaan pembayaran yang dilakukan fasilitator itu merupakan kerugian negara yang nilainya mencapai Rp1,42 miliar lebih. (D41)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: 50 Persen Kasek-Guru Suka Pungli” (<i>Edisi 5 April 2021</i>)</p> <p>42) <i>Mutasi besar-besaran di lingkup Pemkot Makassar bakal dilakukan serentak bersama pejabat eslon II dan direksi perusahaan daerah. Termasuk pergantian kepala sekolah dan guru SD dan SMP. Praktik pungutan liar jadi pemicunya. (D42)</i></p>	<p>Masyarakat Amungme dan Kamoro (D38)</p> <p>Kepala sekolah (D39)</p> <p>Fasilitator (D41)</p> <p>Pejabat eslon II, direksi perusahaan daerah, kepala sekolah, guru SD dan SMP (D42)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>43) <i>Ia pun menegaskan, laporan yang masuk mulai dari jenjang SD hingga SMP. Mulai dari memberatkan orang tua murid, sogok menyogok memakai dana sekolah untuk kepentingan pribadi (D43)</i></p> <p>44) <i>Ia mengungkapkan, evaluasi guru dan kepala sekolah tak akan mengganggu kegiatan proses pendidikan. (D44)</i></p> <p>45) <i>Berdasarkan hasil evaluasi Ombudsman Makassar, sektor pendidikan memang paling banyak pelanggaran. Terutama pelanggaran maladministrasi. (D45)</i></p> <p>46) <i>Ia menyebut pelanggaran maladministrasi yang terjadi di disdik menyangkut sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. (D46)</i></p> <p>47) <i>Komisioner Ombudsman, Muhammad Irwan juga meminta Disdik segera melakukan evaluasi. Sebab, dia menilai ada banyak hal pada sistem PPDB yang masih perlu diperbaiki. (D47)</i></p> <p><i>E-paper Harian Fajar “Judul Berita: Tetap Mengajar Meski Belum digaji” (Edisi 6 Mei 2021)</i></p> <p>48) <i>Ardi dan rekan guru honorer yang lain tak ingin konsentrasi pecah hanya karena persoalan</i></p>	<p>Orang tua murid (D43)</p> <p>Guru dan kepala sekolah (D44)</p> <p>Ombudsman Makassar (D45)</p> <p>Diskdi (D46)</p> <p>Disdik (D47)</p> <p>Rekan guru honorer yang lain</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>gaji. (D48)</i></p> <p>49) Hasil pertemuan itu, gaji honorer akan dicairkan dua tahap. Disdik berjanji melakukan proses pencairan mulai Jumat, 7 Mei. (D49)</p> <p>50) Sebagai tulang punggung keluarga, pendapatan sebagai guru honorer menjadi pemasukan utama bagi keluarganya. (D50)</p> <p>51) Pihaknya sudah berkali-kali menyurat ke sekolah agar 200 orang yang terdata tersebut segera menyerahkan nomor rekening. (D50)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: diduga Korupsi Bos Kantor Disdik digeledah” (Edisi 28 Mei 2021)</p> <p>52) Kantor Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat digeledah penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). (D52)</p> <p>53) Edwin merinci, selain Kantor Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, penyidik Kejaksaan juga menggeledah SMKN 53 Cengkareng guna proses penyidikan lebih lanjut pada Senin, 24 Mei lalu. (D53)</p>	<p>(D48)</p> <p>Disdik (D49)</p> <p>Guru honorer (D50)</p> <p>Ke sekolah (D51)</p> <p>Penyidik dari Kejaksaan negeri (kejari) Jakarta Barat (D52)</p> <p>Penyidik Kejaksaan (D53)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>54) Berdasarkan informasi, penyidik menyita tiga koper dokumen dan “CPU” komputer pada dua lokasi penggeledahan terkait dugaan korupsi senilai Rp7,8 miliar itu. (D54)</p> <p>55) Menurutnya, setiap warga negara termasuk pejabat, punya hak yang sama dihadapan hukum. Sehingga tidak ada masalah ketika para pejabat terkait harus diperiksa demi hukum. (D55)</p> <p>56) Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan pejabat-pejabat yang terkait kasus dugaan korupsi BOP dan BOS diperiksa. (D56)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Salah Input, Potongan Sertifikasi dikembalikan” (Edisi 31 Mei 2021)</p> <p>57) Dengan dalih membayar iuran BPJS Kesehatan, sebanyak 935 guru mendapatkan pemotongan berlebih dari tunjangan sertifikasinya. (D57)</p> <p>58) Pemkot Parepare mengakui ada kesalahan saat memotong tunjangan sertifikasi guru. (D58)</p> <p>59) Arifuddin menambahkan, pengembalian dilakukan langsung ke rekening masing-masing guru. (D59)</p>	<p>Penyidik (D54)</p> <p>Pejabat (D55)</p> <p>Pejabat-pejabat (D56)</p> <p>Guru (D57)</p> <p>Pemkot parepare (D58)</p> <p>Guru (D59)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>60) Pihaknya sudah memberikan teguran keras kepada operator terkait. (D60)</p> <p>61) Proses penandatanganan dilakukan secara bertahap kepada semua guru yang menerima sertifikasi itu. (D61)</p> <p><i>E-paper</i> Media Indonesia “Judul Berita: ASN DKI Terbukti Korupsi di Sekolah” (Edisi 27 Mei 2021)</p> <p>62) Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memepersilahkan pihak penegak hukum untuk memeriksa ASN Pemprov DKI yang diduga terkait dengan tindakan pidana korupsi dan tindak pidanan lainnya. (D62)</p> <p>63) Proses penganggaran itu juga sudah melakukan pembahasan dengan DPRD DKI dan telah dipertimbangkan serta diperhitungkan sesuai dengan bobot kebutuhannya. (D63)</p> <p>64) Senin (24/5) Kejari Jakbar menggeledah kantor Suku Dinas pendidikan 1 Jakarta. (D64)</p> <p>65) Namun, sejumlah guru di sekolah itu menyatakan siap mengembalikan uang hasil korupsi itu kepada negara (D65)</p>	<p>Kepada operator terkait (D60)</p> <p>Guru (D61)</p> <p>ASN Pemprov DKI (D62)</p> <p>DPRD DKI (D63)</p> <p>Kejari Jakbar (D64)</p> <p>Guru (D65)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>Individualisasi merupakan strategi menampilkan aktor dengan jelas kategorinya secara spesifik.</p> <p>Kartu data objektivasi pada <i>E-paper</i> Harian Fajar dan <i>E-paper</i> media Indonesia:</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Rekrutmen Guru PPPK Diskriminatif” (<i>Edisi 2 Januari 2021</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Pengamat pendidikan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Erwin Akib</i> menilai, kebijakan menghapus rekrutmen calon aparatut sipil negara (CASN) untuk profesi guru bisa mematikan langkah para calon tenaga pendidik. (D1) 2) <i>Mahasiswa Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Makassar (UNM), Andi Tenri Abeng</i> juga menilai kebijakan ini mendiskriminasi profesi guru. (D2) 3) <i>Ketua Ikatan Guru Honorer Indonesia Kawasan Timur, Ali Kham</i> menyayangkan kebijakan pemerintah yang hanya menerima guru jalur PPPK. (D3) 4) <i>Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Hery Sumiharto</i> mengatakan, pengangkatan guru jalur PPPK sudah menjadi kebijakan pusat. (D4) 5) <i>Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Muhammad</i> 	<p>Pengamat pendidikan Universitas (Unismuh) Makassar Erwin Akib (D1)</p> <p>Mahasiswa Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Makassar (UNM) (D2)</p> <p>Ketua Ikatan Guru Honorer Indonesia Kawasan Timur (D3)</p> <p>Sekertaris Dinas Pendidikan Sulsel</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>Jufri juga mengakui pasti ada pihak yang tentu kecewa atas kebijakan ini. (D5)</i></p> <p>6) Kepala Kantor Regional BKN Wilayah IV Makassar, Harun Arsyad mengatakan, kebijakan untuk memberdayakan PPPK sudah diambil oleh Pemerintah Pusat. (D6)</p> <p><i>E-paper</i> Harian fajar “Judul Berita: Kejari Luwu Sita Dua Koper Dokumen” (Edisi 27 Januari 2021)</p> <p>7) Kasi Intel Kejari, Luwu, Jainurdin mengakui, dokumen yang diambil akan menjadi barang bukti dalam kasus korupsi pengadaan seragam sekolah untuk SD dan SMP tahun 2019 (D7)</p> <p>8) Sementara itu, Kepala Kejari Luwu, Erny Veronica Maramba mengatakan, dokumen yang disita ini sangat mendukung proses pembuktian dipersidangan nanatinya (D8)</p>	<p>(D4) Kepala Dinas Pendidikan Sulsel (D5) Kepala Kantor Regional BKN Wilayah IV Makassar (D6)</p> <p>Kasi Inter Kejari (D6)</p> <p>Kepala Kejari Luwu (D8)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: ‘Karpas Merah’ untuk Anak Guru” (<i>Edisi 4 Februari 2021</i>)</p> <p>9) Kepala SMAN 20 Makassar Mirsan Midding menolak adanya aturan tersebut. Menurutnya anak guru mesti mendapat kuota khusus. (D9)</p> <p>10) Hal yang sama juga diungkapkan Kasek SMAN 2 Makassar, Asrar. Menurutnya prioritas harus diberikan kepada anak guru. (D10)</p> <p>11) Tim Ahli Disdik Sulsel, Syarifuddin sempat memberikan gambaran, jika kuota perpindahan siswa dalam satu sekolah hanya 10 orang. (D11)</p> <p>12) Kepala bidang pembinaan SMA Disdik Sulsel, Idrus mengatakan, perancangan draft PPDB baru akan dilakukan (D12)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Pemecatan Guru Honorer dinilai Berlebihan” (<i>Edisi 11 Februari 2021</i>)</p> <p>13) Hervina menjadi salah seorang guru honorer di SD 169 Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone yang dipecat sepihak oleh sekolah. (D13)</p> <p>14) Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim menilai, pemecatan ini berlebihan. (D14)</p> <p>15) Sementara itu, Bupati Bone, Andi Fahsar</p>	<p>Kepala SMAN 20 Makassar (D9)</p> <p>Kasek SMAN 2 Makassar (D10)</p> <p>Tim Ahli Disdik Sulsel (D11)</p> <p>Kepala bidang pembinaan SMA Disdik Sulsel (D12)</p> <p>Guru honorer di SD 169 Desa Sadar (D13)</p> <p>Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) (D14)</p> <p>Bupati Bone</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>Mahdin Padjalangi</i> turut memberikan respons. Guru tersebut tidak diberhentikan. Melainkan, sudah banyak tenaga guru di sana. (D15)</p> <p>16) <i>Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Muhammad Salam</i> menyalahkan insiden tersebut. (D16)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Dorong Perbaikan Gaji Honorer” (Edisi 14 Februari 2021)</p> <p>17) <i>Anggota DPR RI, Muhammad Aras</i> menegaskan, jangan hanya karena gara-gara memposting gaji di media sosial yang diperoleh selama 4 bulan sebesar Rp700 ribu, lalu secara sepihak diberhentikan sebagai guru honorer di SDN 169 Sadar, Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe. (D17)</p> <p>18) <i>Kepala Desa Sadar, Andi Sudi Alam</i>, meminta kepada pihak terkait untuk tidak memberhentikan Hervina sebagai guru honorer. Namun, dicarikan solusi untuk kembali mengajar. Apalagi, dia telah mengabdikan puluhan tahun. (D18)</p>	<p>(D15)</p> <p>Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone (D16)</p> <p>Anggota DPR RI (D17)</p> <p>Kepala Desa Sadar (D18)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Belum Ada Izin Belajar di Sekolah” (<i>Edisi 5 Maret 2021</i>)</p> <p>19) Kepala MAN II Model Makassar, Kaharuddin mengakui itu. Hanya saja, ia mengatakan, sebelum aktivitas belajar, pihaknya sudah menyurati orang tua siswa untuk meminta izin. (D519)</p> <p>20) Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Zulfa mengatakan, sekolah ataupun Dinas Pendidikan Sulsel belum menyampaikan adanya rencana membuka aktivitas belajar. Makanya, sekolah yang melaksanakan kegiatan itu akan ditertibkan. (D20)</p> <p>21) Sekretaris Satgas Covid-19 Sulsel, Ni'mal Lahamang juga menegaskan tren kasus Covid-19 masih cukup tinggi. Mencapai 200 kasus. (D21)</p> <p>22) <i>Dikonfirmasi terpisah</i>, Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, Khaeroni mengaku jika masalah penghentian belajar tatap muka sudah tuntas. (D22)</p> <p>23) <i>Ditambahkan</i>, Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Hery Sumoharto, edaran gubernur untuk aktivitas belajar daring masih berlaku hingga 1 April. (D23)</p>	<p>Kepala MAN II Model Makassar (D19)</p> <p>Kabid Humas Polda Sulsel Kober Pol (D20)</p> <p>Sekretaris Satgas Covid-19 Sulsel (D21)</p> <p>Kepala Kanwil Kemenag Sulsel (D22)</p> <p>Sekretaris Pendidikan Sulsel (D23)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Kejati Bakal Tahan dua Tersangka Lagi” (<i>Edisi 12 Maret 2021</i>)</p> <p>24) <i>Untuk dua tersangka lainnya yakni mantan Kabid SMA yang menjadi ketua penanggung jawab DAK itu, Burhanuddin Bohari dan koordinator fasilitator, Aking Djide juga segera akan ditahan. (D24)</i></p> <p>25) <i>Jelasnya, kata Feri, Busra Edi selaku staf pada Bidang PSMA, bersama-sama dengan Burhanuddin dan Kordinator fasilitaor Aking Djide meminta “jatah” tiga persen kepada 82 kepala sekolah penerima DAK. (D25)</i></p> <p>26) <i>Kepala seksi Penerangan Hukum Kejati Sulbar, Amiruddin menambahkan penyidik punya waktu 20 hari untuk membawa berkas Burhanuddin ke meja hijau. (D26)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Siswa Asrama Taruna diduga dilecehkan” (<i>Edisi 13 Maret 2021</i>)</p> <p>27) <i>Kepala Satuan Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto seperti dilansir dari Antara di Timika mengatakan, kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa puluhan siswa Sekolah Taruna Papua itu terjadi sejak November 2020 hingga 9 Maret 2021. (D27)</i></p> <p>28) <i>Selanjutnya DF membuka pakaian korban. Meski</i></p>	<p>Mantan kabis SMA, ketua penanggung jawab DAK (D24)</p> <p>Staf pada Bidang PSMA; koordinator masilitator (D25)</p> <p>Kepala Seksi Penerangan Hukum kejati Sulbar (D26)</p> <p>Kepala Satuan Reskrim Polres Mimika (D27)</p> <p>Penanggung</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>korban menolak dengan mengancam akan melapor ke Bapak Andi (penanggung jawab asrama putra Sekolah Taruna Papua), DF balik mengancam akan memukul korban. (D28)</i></p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: diduga Peras 82 Kepsek Fasilitator DAK ditahan” (<i>Edisi 20 Maret 2021</i>)</p> <p>29) <i>Koordinator tim fasilitator DAK Sulbar</i>, Aking Djide resmi ditahan Kejati Sulbar. Dia ditetapkan tersangka diduga telah memeras 82 kepala sekolah (Kepsek) menengah atas di Sulbar. (D29)</p> <p>30) <i>Selain Aking, Kejati juga sebelumnya telah menahan Staf Bidang SMA Disdik Sulbar, Busra Edi, Rabu 10 Maret lalu. (D30)</i></p> <p>31) <i>Sehingga tersisa satu tersangka lagi yang belum ditahan, yakni Burhanuddin Bohari, Kepala Bidang SMA selaku penanggung jawab DAK 2020 Rp202 miliar itu. (D31)</i></p> <p>32) <i>Sebelumnya, mantan Kabid SMA Sulbar Burhanuddin Bohari mengaku siap menjalani proses hukum usai ditetapkan sebagai tersangka. (D32)</i></p>	<p>jawab asrama putra Sekolah Taruna Papua (D28)</p> <p>Koordinator tim fasilitator DAK Sulbar (D29)</p> <p>Staf Bidang SMA Disdik Sulbar (D30)</p> <p>Kepala Bidang SMA selaku penanggungjawab DAK (D31)</p> <p>Mantan Kabid SMA Sulbar (D32)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: 50 Persen Kasek-Guru Suka Pungli” (Edisi 5 Apri 2021)</p> <p>33) Wali Kota Makassar, M Ramdhan Pomanto mengaku sudah membuatkan tekad untuk melakukan mutasi. (D33)</p> <p>34) Ketua Ombudsman Kota Makasaar, Andi Ihwan Patiroy mengungkapkan, sektor paling tinggi pelanggaran maladministrasinya yaitu Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar. Dia mencatat ada 22 laporan yang diterima sepanjang tahun lalu. (D34)</p> <p>35) Komisioner Ombudsman, Muhammad Irwan juga meminta Disdik segera melakukan evaluasi. Sebab, dia menilai ada banyak hal pada sistem PPDB yang masih perlu diperbaiki. (D35)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Tetap Mengajar Meski Belum digaji” (Edisi 6 Mei 2021)</p> <p>36) Koordinator aksi yang juga tenaga honorer di SDN 2 Mamajang, Ardi menyebut aksi damai sebagai wujud keresahan para guru. (D36)</p> <p>37) Aksi para guru honorer pun mendapat respons pihak disdik. Kata Ardi, dirinya sudah bertemu langsung Plt Kepala Disdik Makassar, Nielma Palamba. (D37)</p> <p>38) Pemkot bukannya defisit anggaran, namun SK</p>	<p>Wali Kota Makassar (D33)</p> <p>Ketua Ombudsman Kota Makassar (D34)</p> <p>Komisioner Ombudsman (D35)</p> <p>Koordinator akdi yang juga tenaga honorer di SDN 2 Mamajang (D36)</p> <p>Plt Kepala Disdik Makassar (D37)</p> <p>Pejabat Wali</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>perpanjangan tenaga guru kontrak tak kunjung ditandatangani Rudy Djamaluddin saat menjadi Penjabat Wali Kota. (D38)</i></p> <p>39) <i>Guru honorer SMPN 7 Makassar Fahmi S, juga tak kuasa menahan kecewa. Tertahannya gaji justru di saat kebutuhan begitu mendesak. Saat menjelang Lebaran dan himpitan ekonomi yang sulit di tengah pandemi. (D39)</i></p> <p>40) <i>Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto juga tak bisa berbuat banyak. Menurut dia, guru honorer turun aksi, sudah ada keluhan kesah dari beberapa guru. (D40)</i></p> <p>41) <i>Danny pun sudah berkonsultasi. Salah satu opsinya agar SK bisa diperpanjang tangankan dengan mendelegasikan ke Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Muh Ansar. (D41)</i></p> <p>42) <i>Plt Kepala Disdik Makassar, Nielma Palamba berjanji sebelum Idulfitri, semua gaji honorer tuntas. (D42)</i></p> <p>43) <i>Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Andi Siswanta Attas menjelaskan, permasalahan belum terbayarkannya gaji guru karena SK perpanjangan kontrak mereka sejak Januari 2021 lalu hingga saat ini belum juga diteken.</i></p>	<p>Kota (D38)</p> <p>Guru Honorer SMPN 7 Makassar (D39)</p> <p>Wali Kota Makassar (D40)</p> <p>Sekretaris Kota (sekkot) Makassar (D41)</p> <p>Plt Kepala Disdik Makassar (D42)</p> <p>Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) (D43)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p>(D43)</p> <p>44) <i>Sejauh ini, pihaknya telah menemui Rudy Djamaluddin. Namun, Kepala Dinas PUTR Sulsel itu tak kunjung menandatangani SK tersebut. (D44)</i></p> <p>45) <i>Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Hery Sumiharto mengakui pembayaran upah honorer masih tertahan. (D35)</i></p> <p>46) <i>Ditegaskannya bahwa SK itu bisa saja ditandatangani Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Akan tetapi, punya konsekuensi. Mereka hanya tercatat di bulan Maret dan April saja. Tidak dari Januari.</i></p> <p>47) <i>Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Helmy Budiman menjelaskan anggaran untuk gaji tersebut sudah tersedia. Telah tersedia untuk 12 bulan sebagai mana perpanjangan kontrak mereka. (D47)</i></p> <p>48) <i>Ketua Ikatan Guru Honorer Indonesia Kawasan Timur, Ali Khan menyayangkan lambatnya langkah pemerintah membayar gaji guru honorer. Padahal mereka sudah bekerja layaknya guru ASN selama empat bulan terakhir. (D48)</i></p> <p>49) <i>Hasil pertemuan itu, gaji honorer akan dicairkan dua tahap. Disdik berjanji melakukan proses pencairan mulai Jumat, 7 Mei. (D49)</i></p>	<p>Kepala Dinas PUTR Sulsel (D44)</p> <p>Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel (D45)</p> <p>Wali Kota Makassar (D46)</p> <p>Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (D17)</p> <p>Ketua Ikatan Guru Honorer Indonesia Kawasan Timur (D48)</p> <p>Rekan guru honorer (D49)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: diduga Korupsi Bos Kantor Disdik digeleda” (<i>Edisi 28 Mei 2021</i>)</p> <p>50) Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Barat Edwin Beslar membenarkan penggeledahan tersebut. Dia menyebut penggeledahan dilakukan di dua tempat berbeda. (D50)</p> <p>51) Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan pejabat-pejabat yang terkait kasus dugaan korupsi BOP dan BOS diperiksa (D51)</p> <p><i>E-paper</i> Harian Fajar “Judul Berita: Salah Input, Potongan Sertifikasi dikembalikan” (<i>Edisi 31 Mei 2021</i>)</p> <p>52) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parepare, Arifuddin Idris menjelaskan, kesalahan tersebut dilakukan oleh operator. Ia membantah jika dana yang terpotong itu masuk ke kas Disdikbud. (D55)</p> <p>53) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Jamaluddin Achmad, menambahkan, pihaknya telah melakukan permintaan pengembalian kelebihan pemotongan tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). (D53)</p>	<p>Kepala Seksi Intelejen Kejari Jakarta Barat (D50)</p> <p>Wakil Gubernur DKI Jakarta (D51)</p> <p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parepare (D52)</p> <p>Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) (D53)</p>

Tingkatan	Topik	karakteristik	Tingkatan Wacana	Keterangan
			<p><i>E-paper</i> Media Indonesia “Judul Berita: ASN DKI Terbukti Korupsi di Sekolah” (<i>Edisi 27 Mei 2021</i>)</p> <p>54) Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilahkan pihak penegak hukum untuk memeriksa ASN Pemprov DKI yang diduga terkait dengan tindakan pidana korupsi dan tindak pidanan lainnya. (D54)</p> <p>55) Hal itu dikatakannya kala menanggapi status tersangka mantan Kepala SMKN 53 Jakarta Widodo dan mantan staf Sudin Pendidikan 1 Jakarta Barat Muhammad Faisal atas dugaan korupsi operasional pendidikan (BOP) (D58)</p> <p>56) Kasi Penerangan Hukum Kejati DKI Ashari Syam mengatakan kedua ASN DKI itu telah menjadi tersangka (D59)</p> <p>57) Kepala Seksi Pidana Khusus kejar Jakbar Reopan Saragih mengatakan dana BOP tahun anggaran 2018 mengalir ke para guru di SMKN 53 jakbar. (D57)</p> <p>58) Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Barat Aroman mengatakan Widodo masih mengajar dan berstatus sebagai guru (D58)</p>	<p>Wakil Gubernur DKI Jakarta (D54)</p> <p>Mantan Kepala SMKN 53 jakarta, mantan staf Sudin Pendidikan 1 Jakarta Barat (D55)</p> <p>Kasi Penerangan Kejati DKI (D56)</p> <p>Kepala Seksi Pidana Khusus kejar Jakbar (D57)</p> <p>Kepala suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Barat (D58)</p>

